



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi
Universitas Ahmad Dahlan

PPG

prajab

PPG Prajabatan

Mata Kuliah Elektif LITERASI ANTIKORUPSI BERBASIS PROFIL PELAJAR PANCASILA DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Cetakan I



MERDEKA

BELAJAR



MATA KULIAH

LITERASI ANTIKORUPSI BERBASIS PROFIL PELAJAR PANCASILA DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Cetakan 1

Penulis:

Suyitno, M.Pd.

Trisna Sukmayadi, M.Pd.

Yosi Wulandari, M.Pd.

Rizki Firmansyah, L.C., M.Hum

Penelaah:

Dr. Trikinasih Handayani, M.Si

Dr. Dian Artha Kusumaningtyas, M.Pd.Si

Penyunting:

Dr. Wahyu Nanda Eka Saputra, M.Pd., Kons.

Dr. Ardi Kurniawan, M.A.

Agus Supriyanto, M.Pd.

Meita Fitiranawati, M.Pd.

Desain Grafis & Ilustrasi:

M. Nasir Hafizh, S.Kom., M.Kom

Efi Kurniasari, M.Pd.Si

Tata Letak:

Dikdo Harimawanto, S.Kom.

M. Nasir Hafizh, M.Kom

Copyright © 2024

Program Studi Pendidikan Profesi Guru

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Ahmad Dahlan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin
tertulis dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru FKIP UAD



HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penyusun Modul Mata Kuliah	Kaprodi PPG FKIP UAD
	



KATA PENGANTAR DIREKTORAN JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), mengamatkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya dalam Pasal 8 UUGD menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sesuai dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan merupakan program pendidikan yang menyiapkan guru sebagai sumber daya manusia berkualitas untuk memenuhi kondisi ideal guru di Indonesia yang meliputi aspek kuantitas, distribusi, kualifikasi, dan kompetensi. PPG Prajabatan bertujuan menghasilkan guru profesional pemula yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan mampu menggunakan teknologi digital, serta melahirkan hAI-hal yang inovatif dan kreatif. Selain itu, PPG Prajabatan menekankan pada konsep Merdeka Belajar, yang berpusat kepada peserta didik dan pembelajarannya, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PPG Prajabatan mengedepankan penguatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional melalui *clinical practice* atau program praktik lapangan yang diintegrasikan dalam perkuliahan. Sebagai calon guru pemula, mahasiswa PPG Prajabatan perlu dibekali pengalaman pembelajaran yang bermakna yang nantinya akan bermanfaat ketika mereka mengajar di kelas. Hal ini dilaksanakan dengan perkuliahan berbasis kegiatan dan refleksi yang dikombinasikan dengan praktik lapangan, termasuk di sekolah tempat guru pemula akan ditugaskan. Pelaksanaan PPG Prajabatan melibatkan pengajar dari unsur akademisi, praktisi



pendidikan, dan Guru Penggerak. Keterlibatan pengajar dari berbagai unsur ini bertujuan untuk menjembatani teori dan praktik di lapangan.

Paket-paket modul digunakan dalam perkuliahan yang dilaksanakan selama dua semester melalui tiga kelompok matakuliah, yaitu: Mata Kuliah Inti, Mata Kuliah Pilihan Selektif, dan Mata Kuliah Pilihan Elektif. Setiap modul perkuliahan mencakup komponen Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan asesmen, perangkat pembelajaran, dan isi modul. Asesmen ketercapaian CPMK dilaksanakan di antaranya melalui proyek, studi kasus, portofolio, dan tes. Perangkat pembelajaran meliputi Lembar Kerja (LK), media, dan sumber belajar yang dilengkapi dengan pranala ke sumber belajar lainnya sebagai pengayaan.

Isi modul disusun berdasarkan alur MERDEKA, yaitu: Mulai dari diri (M), Eksplorasi konsep (E), Ruang kolaborasi (R), Demonstrasi kontekstual (D), Elaborasi pemahaman (E), Koneksi antar materi (K), dan Aksi nyata (A). Modul dengan alur MERDEKA diharapkan dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri dalam mencapai tuntutan profesi sebagai agen yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu mencetak generasi yang membawa perubahan ke hal yang lebih baik.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif mewujudkan penyelesaian modul ini serta membantu terlaksananya PPG Prajabatan. Semoga Allah Yang Mahakuasa senantiasa memberkati upaya yang kita lakukan demi pendidikan Indonesia. Amin.

Jakarta, Juli 2023

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd



KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN PROFESI GURU

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengambil kebijakan untuk secara bertahap mengganti guru-guru yang memasuki masa pensiun/purna tugas melalui pengangkatan guru baru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajabatan).

Kebijakan tersebut menuntut kesiapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menyelenggarakan PPG Prajabatan dengan jumlah peserta PPG Prajabatan sesuai dengan kebutuhan dan kualitas lulusan untuk menjawab tantangan kebutuhan pendidikan di sekolah.

Menanggapi tuntutan tersebut, Direktorat Pendidikan Profesi Guru (Direktorat PPG) mengkoordinasikan proses peningkatan kapasitas LPTK dalam menyelenggarakan PPG Prajabatan dalam hal jumlah dan mutu pendidikan. Untuk menanggapi tuntutan kualitas penyelenggaraan PPG Prajabatan, salah satu aktivitas yang telah dilakukan oleh Direktorat PPG, di bawah arahan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, telah mengembangkan Modul PPG Prajabatan. Hasil pengembangan tersebut dimuat di dalam dokumen ini.

Modul PPG Prajabatan memuat materi, alur, aktivitas, dan penugasan mahasiswa PPG Prajabatan. Kami berharap dengan adanya Modul PPG Prajabatan ini penyelenggaraan PPG Prajabatan di seluruh LPTK dapat terselenggara secara terstandar agar dihasilkan guru yang memiliki profil dan kompetensi sesuai kebutuhan perkembangan dunia pendidikan secara global.

Kami berterimakasih kepada LPTK penyelenggara PPG Prajabatan atas dukungan dan kerjasama dalam menyelenggarakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Jakarta, Juli 2023

Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Andika Prakasa



PRAKATA PENULIS

Modul mata kuliah Literasi Antikorupsi Berbasis Profil Pelajar Pancasila dalam Perspektif Islam disusun bertujuan membekali mahasiswa tentang memahami konsep-konsep antikorupsi dalam perspektif Islam serta bagaimana mengintegrasikan hal tersebut dalam profil pelajar Pancasila dan menggunakan literasi sebagai sarana menyampaikan wacana antikorupsi.

Materi dalam modul ini disusun dalam activity-based learning mengikuti alur **MERDEKA**, yaitu: **Mulai dari Diri, Eksplorasi Konsep, Ruang Kolaborasi, Demonstrasi Kontekstual, Elaborasi Pemahaman, Koneksi Antarmateri dan Aksi Nyata**. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini.

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pendidik, satuan pendidikan, masyarakat, dan terutama peserta didik sebagai subjek utama proses pembelajaran.

Yogyakarta, Januari 2024

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIREKTORAN JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	iv
KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN PROFESI GURU	vi
PRAKATA PENULIS	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH.....	xi
DAFTAR TUGAS LITERASI ANTIKORUPSI BERBASIS PROFIL PELAJAR PANCASILA DALAM PRESPEKTIF ISLAM	xii
RINGKASAN ALUR MERDEKA.....	xiv
TOPIK 1 PANCASILA SEBAGAI FONDASI LITERASI ANTIKORUPSI: PEMAHAMAN NILAI- NILAI MORAL DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN PANCASILA.....	1
A. Mulai dari Diri	2
B. Eksplorasi Konsep.....	2
C. Ruang Kolaborasi.....	18
D. Demonstrasi Kontekstual.....	20
E. Elaborasi Pemahaman	21
F. Koneksi Antarmateri	21
G. Aksi Nyata	22
TOPIK 2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: TANGGUNGJAWAB SOSIAL PELAJAR PANCASILA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI	23
A. Mulai dari Diri	24
B. Eksplorasi Konsep.....	25
C. Ruang Kolaborasi.....	33
D. Demonstrasi Kontekstual.....	34
E. Elaborasi Pemahaman	34
F. Koneksi Antara Materi	35
G. Aksi Nyata	35
UTS	36
TOPIK 3 BAHASA INDONESIA SEBAGAI PENGHELA LITERASI ANTI KORUPSI	37
A. Mulai dari Diri	37
B. Eksplorasi Konsep.....	39
C. Ruang Kolaborasi.....	48



D.	Demonstrasi Kontekstual.....	48
E.	Elaborasi Pemahaman	49
F.	Koneksi Antar Materi	50
G.	Aksi Nyata	50
	TOPIK 4 PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP KORUPSI	51
A.	Mulai dari Diri	51
B.	Ekplorasi Konsep	53
C.	RUANG KOLABORASI	61
D.	Demonstrasi Kontekstual	62
E.	ELABORASI PEMAHAMAN	62
F.	KONEKSI ANTAR MATERI	63
G.	AKSI NYATA	63
	UAS	64
	PENUTUP	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Tugas Literasi Antikorupsi Berbasis Profil Pelajar Pancasila Dalam Prespektif Islam.....	xii
Tabel 2 Ringkasan Alur Merdeka MK Literasi Antikorupsi Berbasis Profil Pelajar Pancasila Dalam Prespektif Islam.....	xiv
Tabel 3. Lembar Kerja Ruang Kolaborasi Topik 3.....	48
Tabel 4. Film Pendek Anti Korupsi Topik 3	49



CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi sebagai berikut.

1. Menggunakan konsep kebahasaan dalam berliterasi antikorupsi dengan Ayat dan Hadist.
2. Membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi guru serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.
3. Memahami peran guru dan siswa sebagai pendidik dan pelajar Pancasila pada landasan bagi literasi antikorupsi dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila yang dapat membentuk kesadaran anti-korupsi sesuai hukum korupsi dalam ajaran agama.
4. Merancang dan menciptakan proyek sederhana literasi antikorupsi di sekolah dalam bentuk multimoda (infografis/ video) dengan konsep kebahasaan sesuai teori dan konsep.

DAFTAR TUGAS LITERASI ANTIKORUPSI BERBASIS PROFIL PELAJAR PANCASILA DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Tabel 1. Daftar Tugas Literasi Antikorupsi Berbasis Profil Pelajar Pancasila Dalam Prespektif Islam

Bab/Topik	Tugas	LK Kelompok	LK Individu	Bobot
Pancasila sebagai Fondasi Literasi Antikorupsi: Pemahaman Nilai-nilai Moral dalam Konteks Pembelajaran Pancasila	Mendiskusikan studi kasus pencegahan korupsi	Tugas 1.1 Ruang Kolaborasi		5%
	Mempresentasikan studi kasus pencegahan korupsi		Tugas 1.2 Demonstrasi Konteksutual	5%
	Menjawab pertanyaan pemantik terkait integrasi Pancasila dalam literasi antikorupsi		Tugas 1.3 Koneksi Antar Materi	
	Menyusun rancangan sosialisasi literasi antikorupsi di sekolah		Tugas 1.4 Aksi Nyata	
Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Antikorupsi: Tanggungjawab Sosial Pelajar Pancasila dalam Pemberantasan Korupsi	Memberikan tanggapan terhadap kasus korupsi di ruang kelas	Tugas 2.1 Ruang Kolaborasi		5%
	Mempresentasikan hasil diskusi terhadap kasus korupsi di ruang kelas		Tugas 2.2 Demonstrasi Konteksutual	5%
	Menjawab pertanyaan pemantik terkait integrasi Pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah		Tugas 2.3 Koneksi Antar Materi	
	Menulis refleksi berdasarkan pertanyaan pemantik		Tugas 2.4 Aksi Nyata	
Bahasa Indonesia sebagai Penghela Literasi Anti Korupsi	Menggali masalah dan solusi kasus korupsi berbasis referensi	Tugas 3.1 Ruang Kolaborasi		5%
	Mempresentasikan masalah dan solusi kasus korupsi		Tugas 3.2 Demonstrasi Konteksutual	5%
	Menulis refleksi berdasarkan film pendek bertema antikorupsi		Tugas 3.3 Koneksi Antar Materi	



Bab/Topik	Tugas	LK Kelompok	LK Individu	Bobot
	Merancang proyek sederhana mengenai literasi antikorupsi berbasis teks multimodal		Tugas 3.4 Aksi Nyata	
Perspektif Islam terhadap Korupsi	Memberikan tanggapan terhadap perilaku korupsi	Tugas 4.1 Ruang Kolaborasi		5%
	Mempresentasikan tanggapan terhadap perilaku korupsi		Tugas 4.2 Demonstrasi Konteksutual	5%
	Menuliskan refleksi perilaku korupsi di masyarakat dalam perspektif Quran dan hadits		Tugas 4.3 Koneksi Antar Materi	
	Menulis refleksi mengenai perspektif Islam terhadap korupsi		Tugas 4.4 Aksi Nyata	
UTS				25%
UAS				25%



RINGKASAN ALUR MERDEKA

Nama MK : Literasi Antikorupsi Berbasis Profil Pelajar Pancasila Dalam Prespektif Islam

Jumlah Topik : 16 pertemuan

Tabel 1 Ringkasan Alur Merdeka MK Literasi Antikorupsi Berbasis Profil Pelajar Pancasila Dalam Prespektif Islam

No	Judul Topik	Jumlah	Pertemuan	Alur	Rincian Kegiatan	Kebutuhan
1	Pancasila sebagai Fondasi Literasi Antikorupsi: Pemahaman Nilai-nilai Moral dalam Konteks Pembelajaran Pancasila	4	1–4	Mulai dari Diri	Mahasiswa merefleksikan terhadap beberapa topik menarik dalam konteks dan bidang antikorupsi. Mahasiswa merefleksikan pemahaman dan penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencegah dan melawan tindakan korupsi.	Pertanyaan Pemantik
				Eksplorasi Konsep	Mahasiswa memahami konsep-konsep literasi anti korupsi dan pancasila, serta menggali akar nilai-nilai moral dalam pancasila, dan menerapkan nilai-nilai pancasila untuk kesadaran anti korupsi.	
				Ruang Kolaborasi	Mahasiswa menjelajahi dimensi interaktif dari materi “Pancasila sebagai Fondasi Literasi Antikorupsi: Pemahaman Nilai-Nilai Moral dalam Konteks Pembelajaran Pancasila.” Mahasiswa menganalisis kasus anti korupsi dari kasus di Indonesia.	Studi Kasus



				Demonstrasi Kontekstual	Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang kasus anti korupsi dari kasus di Indonesia.	Rubrik Presentasi Kelompok
				Elaborasi Pemahaman	Mahasiswa menggali lebih dalam untuk menguraikan pemahaman nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila, sebagai fondasi utama dalam membangun literasi antikorupsi.	Rubrik Presentasi Kelompok
				Koneksi Antarmateri	Mahasiswa menggambarkan pentingnya menjalin koneksi yang erat antar materi dalam pembahasan “Pancasila sebagai Fondasi Literasi Antikorupsi: Pemahaman Nilai-Nilai Moral dalam Konteks Pembelajaran Pancasila”.	Pertanyaan Pemantik
				Aksi Nyata	Mahasiswa merancang sosialisasi Literasi Antikorupsi di Sekolah yaitu memuat tujuan literasi antikorupsi, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman literasi antikorupsi di kalangan siswa sekolah melalui kegiatan sosialisasi di Sekolah PPL.	
2	Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Antikorupsi: Tanggungjawab Sosial Pelajar	3	5-7	Mulai dari Diri	Mahasiswa menceritakan pengalaman diri untuk menolak perbuatan curang sebagai karakter anti korupsi.	Pertanyaan Refleksi
				Eksplorasi Konsep	Mahasiswa mengeksplor materi mengenal pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan antikorupsi : tanggungjawab sosial pelajar pancasila dalam pemberantasan korupsi.	Pertanyaan Pemantik



	Pancasila dalam Pemberantasan Korupsi			Ruang Kolaborasi	Mahasiswa memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas dengan jawaban informatif dan solutif. dari 5 kasus.	Analisa Kasus
				Demonstrasi Kontekstual	Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja kelompok jawaban informatif dan solutif. dari 5 kasus tentang	Rubrik Presentasi Kelompok
				Elaborasi Pemahaman	Mahasiswa melakukan analisis pengamatan dari video secara langsung pemberantasan korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan dan profil pelajar pancasila di sekolah.	Pertanyaan Pemantik
				Koneksi Antar Materi	Mahasiswa menemukan hubungan antara peran pendidikan kewarganegaraan dan kontribusi profil pelajar pancasila dengan pemberantasan korupsi di lingkungan sekolah.	Pertanyaan Pemantik
				Aksi Nyata	Mahasiswa merefleksikan hubungan antara peran pendidikan kewarganegaraan dan kontribusi profil pelajar pancasila dengan pemberantasan korupsi di lingkungan sekolah.	Pertanyaan Pemantik
3	Bahasa Indonesia sebagai Penghela Literasi Anti Korupsi	8-10	Mulai dari Diri	Mahasiswa merefleksikan kesadaran diri erilaku korupsi dapat terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian.	Pertanyaan Pemantik	
			Eksplorasi Konsep	Mahasiswa mengeksplore dan Mengenal konsep, anda bahasa indonesia sebagai penghela literasi anti korupsi.		



		3		Ruang Kolaborasi	Mahasiswa menggali beragam akar masalah dari kasus korupsi kemudian rumuskan solusi untuk menyelesaikan akar masalah dari korupsi.	Analisa Kasus
				Demonstrasi	Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja kelompok beragam akar masalah dari kasus korupsi kemudian rumuskan solusi untuk menyelesaikan akar masalah dari korupsi.	Rubrik Presentasi Kelompok
				Elaborasi Pemahaman	Mahasiswa menganalisis dan mengungkapkan pendapat dari media video tentang film pendek sikap anti korupsi.	Analisa Kasus
				Koneksi Antar Materi	Mahasiswa menemukan hubungan antara film pendek dengan konsep Bahasa sebagai penghela literasi anti korupsi.	Analisa Kasus
				Aksi Nyata	Mahasiswa menyusun satu proyek sederhana mengenai literasi antikorupsi tentang kebahasaan.	
4	Perspektif Islam terhadap Korupsi	4	11-14	Mulai dari Diri	Mahasiswa merefleksikan nilai-nilai kebaikan berdasar pada nilai-nilai Agama.	Pertanyaan Pemantik
				Eksplorasi Konsep	Mahasiswa menggunakan teori atau konsep dalam ayat, Hadist, dan Tafsir tentang Korupsi. Mahasiswa juga mempelajari konsep Al-Quran, Hadits, dan Fiqih dalam menggambarkan korupsi.	
				Ruang Kolaborasi	Mahasiswa menganalisis kasus terhadap perilaku korupsi yang dikaitkan dengan Agama.	Pertanyaan Pemantik



				Demonstrasi Kontekstual	Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja kelompok kasus terhadap perilaku korupsi yang dikaitkan dengan Agama.	Pertanyaan Pemantik
				Elaborasi Pemahaman	Mahasiswa mengamati secara langsung penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks kehidupan yang lebih luas secara individu.	Pertanyaan Pemantik
				Koneksi Antar Materi	Mahasiswa menemukan hubungan antara gambaran Quran dan hadits tentang korupsi dengan perilaku korupsi yang ada di masyarakat saat ini, dan secara khusus dengan penerapan hukuman pada para koruptor di negara ini.	Pertanyaan Pemantik
				Aksi Nyata	Mahasiswa merefleksikan hukuman kruptor dalam prespektif ayat, Hadist, dan Tafsir dan perilaku baiknya.	Refleksi Diri



TOPIK I

PANCASILA SEBAGAI FONDASI LITERASI ANTIKORUPSI: PEMAHAMAN NILAI-NILAI MORAL DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN PANCASILA

Durasi	4 Pertemuan
Capaian Pembelajaran	Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa dapat: <ol style="list-style-type: none">1. Memahami peran Pancasila sebagai landasan bagi literasi antikorupsi.2. Memahami nilai-nilai moral dalam Pancasila yang dapat membentuk kesadaran anti-korupsi.

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) memasuki ruang kelas dengan harapan besar dan semangat tinggi untuk memahami betapa pentingnya peran Pancasila dalam literasi antikorupsi, khususnya dalam konteks pembelajaran di sekolah. Para mahasiswa PPG telah terlibat dalam berbagai pengalaman praktis di dunia pendidikan, baik sebagai asisten pengajar, peserta magang, atau melalui kegiatan sukarela mengajar. Pengalaman ini memberikan wawasan langsung tentang dinamika di dalam kelas, tantangan yang dihadapi guru, dan bagaimana nilai-nilai moral dapat membentuk karakter peserta didik.

Kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu sosial, khususnya korupsi, menjadi pemicu motivasi yang kuat. Mereka menyadari bahwa korupsi tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah moral yang dapat merusak tatanan sosial. Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai fondasi moral yang kuat untuk membentuk literasi antikorupsi di Masyarakat.

Sebelum memasuki kelas ini, mahasiswa telah diperkenalkan pada nilai-nilai Pancasila selama pendidikan mereka, tetapi mereka datang dengan kesadaran bahwa pemahaman mendalam dan aplikasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran diperlukan. Mereka membawa pandangan yang matang tentang relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi permasalahan korupsi dan mengembangkan karakter yang kuat pada peserta didik.

Pentingnya literasi antikorupsi dalam masyarakat diakui oleh mahasiswa PPG sebagai bagian integral dari pendidikan. Mereka menyadari bahwa peran guru bukan hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan integritas peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai Pancasila sebagai



fondasi literasi antikorupsi dianggap sebagai langkah kritis untuk membentuk generasi yang berintegritas.

A. Mulai dari Diri

Mahasiswa PPG Prajabatan yang berbahagia,

Selamat datang di topik yang pertama yaitu Pancasila sebagai fondasi literasi antikorupsi: Pemahaman nilai-nilai moral dalam konteks pembelajaran Pancasila. Pembelajaran pada topik 1 ini mengarah kepada pemahaman dan penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencegah dan melawan tindakan korupsi. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita melakukan refleksi terhadap beberapa topik menarik dalam konteks dan bidang antikorupsi, kita melakukan refleksi terlebih dahulu beberapa hal di bawah ini.

1. Bagaimana persepsi Anda ketika melihat fenomena tindak korupsi yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab?
2. Menurut Anda, apa yang salah dari giat nilai-nilai Pancasila yang dilakukan bangsa Indonesia, sehingga muncul berbagai kasus tindak korupsi?
3. Silahkan Anda mencari sejumlah literatur, dan identifikasilah hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk memperbaiki implementasi nilai-nilai Pancasila untuk menekan tindak korupsi?
4. Mahasiswa PPG, mari kita diskusikan bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai moral Pancasila secara praktis dalam upaya membangun literasi antikorupsi di lingkungan pendidikan kita. Bagaimana Anda merencanakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam metode pengajaran dan interaksi sehari-hari dengan siswa?
5. Sebagai mahasiswa PPG, mengapa Anda berpikir pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral Pancasila begitu penting dalam memperkuat kesadaran anti korupsi dan integritas di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana Anda sebagai pendidik dapat memainkan peran kunci dalam mengedukasi dan membimbing siswa menuju sikap yang anti-korupsi dan bertanggung jawab?

B. Eksplorasi Konsep

1. Pengenalan Konsep Literasi Antikorupsi dan Pancasila

a. Pengantar Konsep Literasi Antikorupsi

Pengertian literasi antikorupsi merupakan suatu konsep yang penting dalam memerangi korupsi di Indonesia. Literasi antikorupsi dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan,



sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencegah dan melawan tindakan korupsi.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, literasi antikorupsi menjadi semakin relevan. Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, literasi antikorupsi menjadi salah satu upaya penting dalam membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang korupsi serta memberikan keterampilan yang diperlukan untuk melawan praktik korupsi.

Literasi antikorupsi mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman tentang korupsi, pengenalan terhadap tindakan korupsi, dan pengetahuan tentang mekanisme pencegahan dan penindakan korupsi. Selain itu, literasi antikorupsi juga melibatkan pengembangan sikap yang kritis terhadap korupsi, seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pentingnya literasi antikorupsi tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga melibatkan berbagai sektor masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi antara berbagai pihak dalam mempromosikan literasi antikorupsi menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi korupsi.

Dalam konteks pendidikan, literasi antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam membentuk pemahaman dan sikap yang benar terhadap korupsi. Dengan memperkenalkan literasi antikorupsi sejak dini, generasi muda akan memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya memerangi korupsi dan memiliki keterampilan untuk melakukannya.

Selain itu, literasi antikorupsi juga dapat dilakukan melalui berbagai media dan kampanye publik. Media massa, internet, dan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan informasi tentang korupsi dan membangun kesadaran masyarakat. Kampanye publik yang melibatkan berbagai pihak juga dapat membantu meningkatkan literasi antikorupsi dan menginspirasi tindakan nyata dalam mencegah dan melawan korupsi. Dalam mengembangkan literasi antikorupsi, penting untuk memperhatikan aspek pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Literasi antikorupsi bukanlah sekadar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam waktu singkat, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan perubahan perilaku dan sikap dalam jangka panjang.

Literasi antikorupsi merupakan konsep yang penting dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dengan memahami pengertian literasi antikorupsi dan



mengimplementasikannya secara luas, kita dapat membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya melawan korupsi dan memiliki keterampilan untuk melakukannya. Literasi antikorupsi harus menjadi bagian integral dari upaya pencegahan dan penindakan korupsi, sehingga dapat menciptakan perubahan yang nyata dalam membangun masyarakat yang bersih dan berintegritas.

b. Pancasila Sebagai Sumber Inspirasi: Membangun Etika Antikorupsi dalam Masyarakat

Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita perlu membangun etika antikorupsi dalam masyarakat. Salah satu sumber inspirasi yang dapat digunakan untuk membangun etika tersebut adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima nilai dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan etika antikorupsi dalam masyarakat.

Pertama, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan. Menghormati Tuhan dan berprinsip menjalankan perbuatan yang benar adalah bagian dari etika antikorupsi. Memiliki kesadaran bahwa korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, akan mendorong individu untuk menghindari praktek korupsi.

Kedua, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengingatkan kita untuk saling menghargai dan berlaku adil terhadap sesama. Dalam upaya membangun etika antikorupsi, pengertian bahwa tindakan korupsi merugikan kepentingan masyarakat luas akan menjadi landasan yang kuat untuk menolak praktek korupsi. Selain itu, nilai beradab juga mengajarkan kita untuk menghormati hukum dan aturan yang berlaku, sehingga menumbuhkan sikap taat pada hukum pada setiap individu.

Ketiga, nilai Persatuan Indonesia menekankan pentingnya rasa persaudaraan dan kebersamaan dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi. Dengan memiliki semangat persatuan, setiap individu akan berjuang bersama-sama melawan korupsi dan tidak membiarkan tindakan korupsi merusak keharmonisan sosial.

Keempat, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan pentingnya partisipasi aktif



masyarakat dalam memerangi korupsi. Dalam konteks ini, masyarakat harus dapat secara aktif mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi kepada pihak yang berwenang. Adanya partisipasi masyarakat akan mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengelolaan negara.

Kelima, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengajarkan pentingnya pemerataan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dalam membangun etika antikorupsi, setiap individu harus memiliki kesadaran bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak adil dan merugikan masyarakat secara luas. Dengan menerapkan nilai keadilan sosial, kita dapat mendorong terciptanya sistem yang berkeadilan dan bebas dari korupsi.

Membangun etika antikorupsi dalam masyarakat adalah sebuah tantangan yang kompleks, tetapi dengan mengambil inspirasi dari Pancasila sebagai landasan, kita dapat mengembangkan kesadaran dan kesanggupan kolektif untuk melawan korupsi. Setiap individu, mulai dari kalangan masyarakat biasa hingga pucuk pimpinan negara, memiliki peran penting dalam upaya ini. Dengan bersama-sama, kita dapat membangun masyarakat yang bersih dari korupsi dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan nilai keadilan sosial, kita dapat mendorong terciptanya sistem yang berkeadilan dan bebas dari korupsi.

Membangun etika antikorupsi dalam masyarakat adalah sebuah tantangan yang kompleks. Hal ini akan melibatkan upaya yang berkelanjutan dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Pancasila, sebagai landasan negara Indonesia, memberikan inspirasi yang berharga dalam mengatasi masalah korupsi ini. Melalui prinsip-prinsip dasar Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, ketuhanan yang maha esa, dan demokrasi, kita dapat mengembangkan kesadaran dan kesanggupan kolektif untuk melawan korupsi. Dalam hal ini, Pancasila bukan hanya menjadi dokumen konstitusi, tetapi juga menjadi pedoman moral yang mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi. Tidak hanya pemerintah atau pimpinan negara yang memiliki peran penting dalam upaya ini, melainkan setiap individu dari berbagai kalangan masyarakat.

Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melawan korupsi dan menegakkan keadilan. Mulai dari memberikan laporan jika menemui tindakan korupsi di lingkungan sekitarnya, hingga menjadi pemimpin yang bersih dan menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi, kolaborasi dan sinergi antara individu, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat



penting. Melalui kerjasama yang solid, kita dapat menciptakan sistem yang kuat dan efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Visi kita adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang bersih dari korupsi dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Dalam perjalanan mencapai visi ini, tidak akan mudah, tetapi dengan bersama-sama dan tekad yang kuat, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik.

2. Menggali Akar Nilai-Nilai Moral dalam Pancasila

a. Menelusuri Landasan Kebijaksanaan: Filosofi dan Nilai-Nilai Moral di Balik Pancasila

Pancasila adalah landasan filosofis negara Indonesia yang tertuang dalam konstitusi negara sebagai pedoman hidup berbangsa. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “lima prinsip”, dan merupakan perwujudan nilai-nilai moral dan filosofis yang telah membentuk masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Esai ini menelusuri landasan kearifan yang mendasari Pancasila, mengkaji nilai-nilai filosofis dan moral yang membentuk doktrin penting nasional tersebut. Kami juga akan mempertimbangkan relevansi Pancasila dalam masyarakat kontemporer, khususnya perannya dalam memajukan persatuan dan identitas nasional dalam menghadapi tantangan pluralisme dan multikulturalisme.

Akar filosofis Pancasila mengacu pada serangkaian tradisi filosofis dan keagamaan, yang mencerminkan keragaman warisan budaya Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan pengaruh konsep dharma Hindu-Buddha yang menekankan pentingnya kewajiban moral dan keselarasan spiritual. Prinsip kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan konsep Islam tentang tauhid yang menekankan keesaan Tuhan dan pentingnya keadilan sosial. Terakhir, sila ketiga, persatuan Indonesia, mengacu pada konsep humanisme Barat yang menekankan pentingnya martabat dan kebebasan individu. Secara bersama-sama, tradisi filosofis ini memberikan landasan yang kaya bagi nilai-nilai moral dan etika yang mendasari Pancasila.

Kelima sila Pancasila mewujudkan seperangkat nilai moral dan etika yang menjadi sentral dalam masyarakat Indonesia. Prinsip pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pentingnya keimanan spiritual dan kewajiban moral. Prinsip kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan pentingnya keadilan sosial dan supremasi hukum. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mencerminkan pentingnya jati diri dan solidaritas nasional. Sila keempat, demokrasi yang berpedoman pada kearifan batin



dalam kebulatan suara yang timbul dari permusyawaratan perwakilan, mencerminkan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Terakhir, prinsip kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan pentingnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Secara bersama-sama, prinsip-prinsip ini memberikan kerangka komprehensif bagi perilaku moral dan etika dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia kontemporer, Pancasila menghadapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh pluralisme dan multikulturalisme negara ini. Namun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap berperan penting dalam memajukan persatuan dan jati diri bangsa. Dengan menekankan pentingnya keimanan spiritual, keadilan sosial, dan solidaritas nasional, Pancasila memberikan kerangka untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. Misalnya, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan dan kesenjangan, sedangkan prinsip demokrasi yang berpedoman pada kearifan batin dalam kebulatan suara yang timbul dari musyawarah perwakilan dapat digunakan untuk memajukan nilai-nilai demokrasi dan peraturan hukum. Pada akhirnya, Pancasila tetap menjadi landasan penting bagi masyarakat Indonesia, memberikan kekayaan dan keragaman nilai-nilai yang terus membentuk identitas dan budaya bangsa.

b. Pancasila Sebagai Pemersatu Moral: Membangun Kesadaran Etis dalam Masyarakat

Di tengah kompleksitas kehidupan modern, Pancasila sebagai pemersatu moral menonjol sebagai pandangan hidup yang mendalam dan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Sebagai suatu konsep yang lebih dari sekadar kerangka politik, Pancasila mampu meresap ke dalam keseharian dan membangun kesadaran etis yang kokoh di kalangan masyarakat.

Pancasila, dengan lima sila yang dimilikinya, menjadi fondasi moral yang membentuk karakter individu dan mengakar dalam nilai-nilai kemanusiaan. Ketuhanan yang maha esa tidak hanya dipahami sebagai dimensi agama, melainkan sebagai panggilan untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, salah satu prinsip Pancasila, menciptakan landasan etika yang memandu interaksi sosial. Keadilan, sebagai nilai utama, mengilhami kesadaran etis untuk bertindak dengan adil, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan tempat yang setara bagi setiap individu.



Demokrasi, sebagai sila keempat Pancasila, menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Kesadaran etis tumbuh dalam budaya gotong royong dan partisipasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya membangun negara yang demokratis.

Pendidikan Pancasila yang menjadi bagian integral dari kurikulum di Indonesia bukan hanya sekadar penyampaian informasi, melainkan upaya membentuk karakter dan kesadaran etis setiap generasi. Prinsip-prinsip moral ini ditanamkan dalam pola pikir anak-anak sejak dini, menciptakan pondasi kuat bagi pembentukan masyarakat yang memiliki integritas moral.

Pancasila, dengan ciri khas persatuan dan kesatuan, menciptakan kesadaran etis untuk menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan solidaritas. Kemanusiaan sebagai prinsip sentral memberikan dasar moral untuk memandang setiap individu sebagai bagian dari satu keluarga besar bangsa Indonesia.

Perlindungan terhadap hak minoritas, sebagai nilai lainnya, menciptakan kesadaran etis untuk menghargai keberagaman dan mewujudkan masyarakat inklusif. Dalam kesadaran etis ini, setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara dijaga dengan adil.

Pancasila tidak hanya berperan dalam ranah politik, tetapi juga memberikan arahan moral dalam kebijakan publik. Kesadaran etis tumbuh ketika nilai-nilai Pancasila tercermin dalam tindakan pemerintah dan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam ranah ekonomi, Pancasila memberikan landasan moral untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Kesadaran etis masyarakat mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, menjadikan ekonomi sebagai instrumen pembangunan yang memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan memandang Pancasila sebagai cermin identitas nasional, masyarakat Indonesia menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Kesadaran etis menjadi perekat sosial, mengikat individu-individu dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama mewujudkan visi negara yang sesuai dengan semangat Pancasila sebagai pemersatu moral.

3. Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila untuk Kesadaran Anti-Korupsi

a. Pendidikan Antikorupsi: Membangun Kesadaran Masyarakat Melalui Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila



Pendidikan antikorupsi memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman korupsi, sebuah langkah strategis untuk membentuk tatanan sosial yang bersih dan adil. Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, pendidikan antikorupsi menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan. Pendidikan antikorupsi bukan sekadar menyampaikan informasi tentang hukum, tetapi juga menciptakan kesadaran etis dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan moral dalam hidup sehari-hari.

Keadilan, persatuan, dan kesatuan, yang menjadi pilar Pancasila, diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan antikorupsi untuk membentuk karakter masyarakat yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya anti korupsi menjadi tujuan pendidikan ini, mencerminkan semangat demokrasi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai agen utama pembangunan.

Etika pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab menjadi fokus dalam pembelajaran antikorupsi, menciptakan pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, yang ditekankan dalam Pancasila, diintegrasikan dalam strategi pembelajaran antikorupsi untuk membentuk sistem yang terbuka dan bertanggung jawab.

Pendidikan antikorupsi juga memberikan perhatian khusus pada konteks multikulturalisme, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat merasakan keadilan dan kesetaraan. Kesadaran berbasis nilai menjadi landasan utama dalam pendidikan antikorupsi, menciptakan pemahaman mendalam tentang bahaya korupsi dan dampak negatifnya.

Pendidikan antikorupsi diimplementasikan sejak dini, membantu anak-anak memahami nilai-nilai Pancasila dan mengembangkan sikap yang menolak praktik korupsi. Dalam konteks literasi antikorupsi, masyarakat diberdayakan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menolak tindakan korupsi dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Media digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan pendidikan antikorupsi, mempromosikan nilai-nilai Pancasila yang menolak korupsi dalam semua aspek kehidupan. Institusi pendidikan menjadi agen sentral dalam pendidikan antikorupsi, membentuk karakter dan kesadaran etis melalui pengajaran nilai-nilai Pancasila.

Program pendidikan antikorupsi disosialisasikan secara luas, memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila meresap ke seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperkuat dalam



upaya pendidikan antikorupsi, meneguhkan implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor.

Penegakan hukum yang adil diintegrasikan dalam pembelajaran antikorupsi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam Pancasila. Pendidikan antikorupsi juga memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat, memastikan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menciptakan lingkungan bebas dari korupsi.

Pancasila dilihat sebagai perekat sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pendidikan antikorupsi, menciptakan dasar untuk tindakan sehari-hari yang sesuai dengan semangat Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan antikorupsi bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai langkah konkret untuk membentuk kesadaran masyarakat dan menciptakan budaya yang menolak korupsi dalam segala bentuknya. Melalui pendidikan antikorupsi yang berbasis Pancasila, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan sosial yang bersih, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

b. Pancasila dalam Tindakan: Strategi Implementasi Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Korupsi telah menjadi masalah sosial yang meresahkan masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Untuk mengatasi masalah ini, implementasi nilai-nilai anti-korupsi sangat penting dalam menjaga integritas sebuah negara. Salah satu pondasi nilai-nilai tersebut terdapat dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia.

Pancasila tidak hanya menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga harus diolah dan diterapkan dalam tindakan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan korupsi di Indonesia. Pertama-tama, salah satu nilai Pancasila yang relevan dalam memerangi korupsi adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Artinya, setiap warga negara harus diperlakukan secara adil dan merasakan kesejahteraan yang sama. Dalam konteks anti-korupsi, nilai ini mengandung makna bahwa segala bentuk tindakan korupsi harus diberikan hukuman sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan hak rakyat yang terzalimi.

Dalam implementasinya, perlu diadakan reformasi hukum yang memastikan proses hukum yang adil dan efektif terhadap para pelaku korupsi. Nilai lainnya yang dapat digunakan sebagai strategi implementasi nilai-nilai anti-korupsi adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam konteks ini, makna yang dapat diinterpretasikan adalah bahwa setiap individu memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, dan dengan demikian harus bertindak sesuai dengan



ajaran agamanya. Agama mengajarkan nilai-nilai moral yang melarang perbuatan korupsi, seperti jujur, adil, dan transparan dalam berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, memperkuat pendidikan agama menjadi langkah penting dalam membangun karakter yang integritas, sehingga dapat menekan perilaku korupsi di masyarakat.

"Persatuan Indonesia" juga menjadi pondasi yang kuat dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti-korupsi dalam tindakan. Makna dari nilai ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks anti-korupsi, persatuan Indonesia mengajar kita untuk menghindari tindakan korupsi dengan alasan egoisme atau keuntungan pribadi, dan fokus pada pemberantasan korupsi sebagai upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan bagi semua warga negara.

Pancasila juga mengandung nilai-nilai seperti "Demokrasi yang dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan" dan "Persatuan yang terwujud dalam keragaman". Nilai-nilai ini harus diimplementasikan dalam menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi. Sistem demokrasi yang baik dan transparan akan meminimalisir adanya ruang bagi korupsi, karena pemerintah yang bertanggung jawab dan akuntabel akan diawasi oleh masyarakat dengan baik. Selain itu, menjunjung tinggi keragaman juga penting, karena keragaman suara akan membuka peluang untuk berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik tanpa ada kepentingan yang menyimpang.

Pancasila dalam tindakan sebagai strategi implementasi nilai-nilai anti-korupsi harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, agama, dan masyarakat umum. Sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila yang anti-korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, dari tingkat pendidikan formal hingga nonformal. Pendidikan tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas harus diberikan sejak dini agar tumbuh kesadaran yang kuat untuk menghindari perilaku korupsi di kemudian hari.

Dalam rangka mencapai masyarakat yang bebas korupsi, penguatan lembaga penegak hukum harus dilakukan. Proses hukum yang transparan, adil, dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku korupsi adalah langkah penting dalam menegakkan nilai-nilai anti-korupsi yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah agar korupsi di dalamnya dapat dihindari dan diberantas. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan pondasi yang kuat dalam implementasi nilai-nilai anti-



korupsi. Dengan memperkuat pendidikan moral, melibatkan agama sebagai penguat moral, menjaga persatuan dan kesatuan, dan memperkuat sistem demokrasi yang transparan, diharapkan korupsi dapat diatasi dan integritas bangsa dapat terjaga.

Implementasi nilai-nilai anti-korupsi tersebut harus melibatkan berbagai pihak, dan kerjasama masyarakat sangatlah penting dalam menciptakan Indonesia yang bebas korupsi. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah agar korupsi di dalamnya dapat dihindari dan diberantas. Pengawasan yang ketat ini mencakup berbagai mekanisme kontrol, seperti audit internal dan eksternal, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengadukan dugaan korupsi yang terjadi. Dengan adanya pengawasan yang ketat ini, diharapkan tindakan korupsi dapat diminimalisir dan jangan sampai menjadi budaya yang merusak sistem pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan pondasi yang kuat dalam implementasi nilai-nilai anti-korupsi. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang mendasari integritas dan kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pendidikan moral yang kuat, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya menolak korupsi. Selain itu, melibatkan agama sebagai penguat moral juga penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Agama memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral individu maupun masyarakat. Dengan mengintegrasikan ajaran agama dalam pendidikan dan mempromosikan nilai-nilai kerohanian, diharapkan masyarakat akan lebih memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas publik dan berinteraksi dengan pemerintahan.

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan kerjasama yang erat antara semua elemen masyarakat. Masyarakat perlu bersatu dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan korupsi. Penggalangan dukungan dari berbagai kelompok sosial dan budaya harus dilakukan, sehingga solidaritas dan semangat keadilan dapat terus terjaga. Selain itu, memperkuat sistem demokrasi yang transparan juga merupakan bagian penting dalam upaya memerangi korupsi.

Dengan adanya transparansi dalam mekanisme pengambilan kebijakan dan penggunaan anggaran negara, kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi akan berkurang secara signifikan. Dalam sistem demokrasi yang



transparan, terdapat mekanisme pengawasan yang efektif, seperti lembaga-lembaga otoritas transparansi keuangan dan media yang independen, sehingga koruptor sulit untuk melakukan tindakan melawan hukum. Implementasi nilai-nilai anti-korupsi tersebut harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pengawasan sosial dan mengawal pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan melibatkan semua pihak dan menjaga koordinasi yang baik, diharapkan korupsi dapat diatasi dan integritas bangsa dapat terjaga.

Setiap individu dan kelompok memiliki tanggung jawab yang sama dalam memerangi korupsi, karena korupsi merusak moral dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Dalam upaya menciptakan Indonesia yang bebas korupsi, peran masyarakat sangatlah penting. Masyarakat harus lebih aktif dalam menyuarakan pendapat, mengawasi dan melaporkan indikasi korupsi yang mereka temui. Dengan kepedulian dan partisipasi aktif dari masyarakat, korupsi dapat diatasi dan Indonesia dapat menjadi negara yang bermartabat dan menjunjung tinggi integritas.

4. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pencegahan Korupsi

a. Melibatkan Masyarakat: Peran Aktif Warga dalam Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila dalam Pencegahan Korupsi

Masyarakat memiliki peran krusial dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan korupsi. Pertama-tama, partisipasi aktif warga adalah fondasi utama dalam menciptakan budaya integritas. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, masyarakat dapat bersama-sama menolak praktik korupsi yang merugikan bersama. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang esensi Pancasila dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan pengetahuan yang kuat, masyarakat dapat lebih kritis terhadap perilaku koruptif dan menjadi agen perubahan di tingkat individu.



Peran media massa juga tak terbantahkan, karena masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang korupsi melalui media. Masyarakat yang terinformasikan dapat menjadi penegak nilai-nilai Pancasila dengan lebih efektif, mengawasi perilaku koruptif, dan menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku korupsi.

Partisipasi aktif dalam organisasi masyarakat juga memberikan platform bagi warga untuk bersatu dan bersama-sama melawan korupsi. Organisasi ini dapat menjadi wadah untuk berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan strategi pencegahan korupsi di tingkat lokal maupun nasional. Keterlibatan masyarakat juga dapat diperkuat melalui forum-forum diskusi dan dialog antara pemerintah dan warga. Dengan demikian, kebijakan pencegahan korupsi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pendidikan karakter sejak dini juga penting dalam membentuk generasi penerus yang memiliki integritas dan kesadaran moral. Sekolah dapat menjadi wahana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga masyarakat muda tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menolak korupsi.

Pengembangan whistleblower protection dan reward system juga dapat merangsang masyarakat untuk berani melaporkan praktik korupsi tanpa takut terhadap represalias. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana warga merasa aman dan didukung dalam berkontribusi aktif melawan korupsi. Penting juga untuk membangun kesadaran bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta partisipasi aktif warga, dapat menciptakan sistem yang lebih tangguh dalam melawan korupsi.

Masyarakat juga dapat membentuk kelompok advokasi untuk memperjuangkan kebijakan anti-korupsi yang lebih kuat. Dengan bersatu, warga dapat mendesak perubahan hukum dan regulasi yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik juga penting. Transparansi anggaran dan pembahasan bersama terkait alokasi dana dapat meminimalisir peluang terjadinya korupsi.

Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas juga dapat menjadi strategi efektif. Masyarakat yang terampil dapat lebih efisien dalam mengelola sumber daya, mengurangi peluang praktik koruptif, dan membentuk lingkungan ekonomi yang berkelanjutan. Penting untuk mendorong inisiatif kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat masyarakat. Dengan



memberdayakan ekonomi lokal, masyarakat dapat lebih mandiri dan kurang rentan terhadap praktik korupsi.

Sosialisasi kebijakan antikorupsi melalui berbagai saluran komunikasi juga perlu diperkuat. Informasi yang mudah diakses dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan. Mendorong kepatuhan terhadap aturan hukum, termasuk aturan-aturan yang menyangkut korupsi, adalah langkah penting lainnya. Dengan menciptakan kesadaran akan konsekuensi hukum, masyarakat dapat menjadi lebih patuh dan menghindari keterlibatan dalam praktik korupsi.

Kolaborasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan korupsi. Mekanisme koordinasi yang baik dapat memastikan bahwa berbagai pihak saling mendukung dan melengkapi dalam mencapai tujuan bersama.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk melaporkan dan mengawasi praktik korupsi. Aplikasi dan platform online dapat menjadi sarana efektif bagi warga untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi. Penting untuk menjaga kebebasan pers sebagai sarana kontrol sosial. Media yang independen dapat berperan sebagai penjaga moralitas dan membantu menyuarakan aspirasi masyarakat terkait pencegahan korupsi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik, dapat memastikan representasi yang lebih adil dan transparan. Ini dapat menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.

Kesadaran akan hak dan kewajiban warga dalam konteks pencegahan korupsi perlu terus ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi lebih proaktif dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Keterlibatan masyarakat bukan hanya tentang menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang berkelanjutan dalam upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

b. Pancasila sebagai Garda Terdepan: Menyusun Rencana Aksi Anti-Korupsi Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Sebagai



garda terdepan, Pancasila mengajarkan nilai-nilai yang sangat relevan dalam menyusun rencana aksi anti-korupsi berbasis nilai-nilai ketuhanan. Dalam rencana aksi ini, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tindakan korupsi dapat diminimalisir.

Pertama-tama, nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Masyarakat harus menyadari bahwa korupsi bertentangan dengan ajaran agama. Dalam menyusun rencana aksi ini, kita harus mengedepankan nilai-nilai moral yang diberikan oleh agama dan menghindari tindakan korupsi. Dengan demikian, kita dapat membantu membangun bangsa yang kuat dan berintegritas.

Kedua, Pancasila juga mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menyusun rencana aksi anti-korupsi, penting untuk memastikan adanya kesetaraan dalam perlakuan hukum dan penggunaan sumber daya negara. Kita perlu memperkuat sistem hukum yang adil dan transparan, memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi, serta memberdayakan lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, penting untuk menghindari diskriminasi dan memastikan semua orang diperlakukan dengan adil.

Selanjutnya, Pancasila juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dan gotong royong dalam membangun bangsa yang maju. Dalam rencana aksi antikorupsi, partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan. Kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menolak korupsi dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran hukum juga sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga menekankan pentingnya pendidikan untuk semua. Dalam menyusun rencana aksi anti-korupsi berbasis nilai-nilai ketuhanan, kita perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang betapa pentingnya perlawanan terhadap korupsi. Melalui pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya integritas dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Dalam menyusun rencana aksi anti-korupsi berbasis nilai-nilai ketuhanan, kita juga perlu memperhatikan efektivitas dari rencana tersebut. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang baik akan membantu memastikan bahwa rencana tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang



diinginkan. Dalam hal ini, kita perlu memantau dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperbaikinya untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila, kolaborasi antar instansi, partisipasi masyarakat, pendidikan yang baik, serta sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, bangsa Indonesia dapat melangkah maju dalam rencana aksi anti-korupsi berbasis nilai-nilai ketuhanan. Dalam upaya ini, penting untuk menjaga semangat gotong royong dan saling mendukung agar kita dapat menciptakan masyarakat yang berintegritas dan berkeadilan. Dengan demikian, tidak hanya menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga membangun masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.

Pedoman dalam menyusun rencana aksi antikorupsi berbasis nilai-nilai Pancasila dapat meliputi langkah-langkah berikut:

- 1) Memahami nilai-nilai Pancasila: Langkah pertama adalah memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi anti-korupsi.
- 2) Analisis situasi korupsi: Melakukan analisis mendalam tentang situasi korupsi di semua sektor, baik itu dalam pemerintahan, bisnis, maupun masyarakat. Identifikasi sumber-sumber korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks nilai-nilai Pancasila.
- 3) Melibatkan semua pemangku kepentingan: Melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kerja sama dan keterlibatan semua pihak sangat penting untuk mencapai tujuan aksi anti-korupsi.
- 4) Membuat komitmen bersama: Menyusun komitmen bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama melawan korupsi. Komitmen ini harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
- 5) Membangun sistem hukum yang adil dan transparan: Memperkuat sistem hukum dengan membentuk atau memperbaiki aturan dan regulasi yang memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap tindakan korupsi dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi.



- 6) Peningkatan pendidikan dan pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
- 7) Membangun mekanisme pengawasan: Membentuk mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi anti-korupsi. Hal ini termasuk penguatan lembaga-lembaga pengawas, sistem pelaporan pelanggaran, dan whistleblower protection.
- 8) Promosi transparansi dan akuntabilitas: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya negara. Rencana aksi anti-korupsi harus mencakup langkah-langkah untuk memperkuat transparansi, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan keuangan.
- 9) Promosi budaya integritas: Mendorong terbentuknya budaya integritas di semua lapisan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui program-program pendidikan dan kampanye kesadaran publik yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila.
- 10) Evaluasi dan pembaruan rencana aksi: Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan rencana aksi anti-korupsi dan melakukan perbaikan atau pembaruan jika diperlukan. Pembaharuan ini harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Dengan mengikuti pedoman ini, diharapkan rencana aksi anti-korupsi berbasis nilai-nilai Pancasila dapat efektif dalam memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat, adil, dan berkeadilan.

C. Ruang Kolaborasi

Dalam ruang kolaborasi ini, mahasiswa akan menjelajahi dimensi interaktif dari materi “Pancasila sebagai Fondasi Literasi Antikorupsi: Pemahaman Nilai-Nilai Moral dalam Konteks Pembelajaran Pancasila.” Ruang ini dirancang sebagai wadah untuk bersama-sama mengembangkan pemahaman kolektif tentang bagaimana nilai-nilai moral Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks pembelajaran dan praktik literasi antikorupsi.

Mari bersama-sama berkontribusi, berbagi pandangan, dan menciptakan ruang kolaboratif yang memungkinkan kita untuk memperkuat pemahaman tentang peran krusial Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi serta mendorong tumbuhnya nilai-nilai integritas dalam masyarakat.



Untuk menunjang kegiatan ini, maka buatlah lima kelompok kemudian tiap kelompok silahkan memilih kasus yang tersedia ini. Satu kelompok harus memilih satu kasus. Kasus-kasus yang harus dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kasus: Penggunaan Dana Desa yang Tidak Transparan

Deskripsi Kasus: Sebuah desa mengalami masalah ketidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Ada indikasi bahwa sejumlah dana desa digunakan tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas, memicu kecurigaan terhadap praktik korupsi. Pertanyaan:

- a. Bagaimana konsep gotong royong dalam Pancasila dapat diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa?
- b. Apa peran nilai keadilan sosial dalam Pancasila untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara adil dan merata?
- c. Bagaimana pendekatan tanggung jawab dalam Pancasila dapat menghindari praktek korupsi dalam penggunaan dana desa?

2. Kasus: Penyelewengan Dana Bantuan Sosial

Deskripsi Kasus: Terdapat indikasi penyelewengan dana bantuan sosial di suatu wilayah, dimana bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan:

- a. Bagaimana nilai-nilai moral Pancasila, seperti gotong royong dan kejujuran, dapat mengurangi potensi penyelewengan dana bantuan sosial?
- b. Sejauh mana prinsip keterbukaan dalam Pancasila dapat mencegah manipulasi dalam distribusi dana bantuan sosial?
- c. Apa langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa penyaluran dana bantuan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

3. Kasus: Nepotisme dalam Proses Rekrutmen Pegawai

Deskripsi Kasus: Suatu lembaga pemerintah terlibat dalam praktik nepotisme dalam proses rekrutmen pegawai, dimana kepentingan keluarga lebih diutamakan daripada kualifikasi dan kompetensi. Pertanyaan:

- a. Bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dapat mengurangi praktik nepotisme dalam rekrutmen pegawai?
- b. Sejauh mana nilai-nilai moral Pancasila, seperti adil dan beretika, dapat menjadi dasar untuk menilai seleksi pegawai?
- c. Apa langkah preventif yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya nepotisme dalam rekrutmen pegawai dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila?



4. Kasus: Korupsi di Lembaga Pendidikan

Deskripsi Kasus: Lembaga pendidikan menghadapi tantangan dengan adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana, mempengaruhi kualitas layanan pendidikan dan mencoreng citra institusi. Pertanyaan:

- a. Bagaimana penerapan nilai-nilai kejujuran dan pelayanan dalam Pancasila dapat mengurangi praktik korupsi di lembaga pendidikan?
- b. Apa peran prinsip tanggung jawab dalam Pancasila dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan?
- c. Bagaimana konsep keadilan sosial dalam Pancasila dapat tercermin dalam distribusi dana pendidikan untuk mengatasi ketidaksetaraan?

5. Kasus: Penyalahgunaan Dana Pendidikan

Deskripsi Kasus: Dana pendidikan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak. Pertanyaan:

- a. Bagaimana penerapan nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab dalam Pancasila dapat mencegah penyalahgunaan dana pendidikan untuk kepentingan pribadi?
- b. Sejauh mana konsep gotong royong dalam Pancasila dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan?
- c. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila demi peningkatan mutu pendidikan?

D. Demonstrasi Kontekstual

Setelah menyelesaikan tugas secara berkelompok, saat ini Anda akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok Anda untuk dapat direspon dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Perhatikan petunjuk berikut untuk memandu Anda bekerja.

1. Buatlah materi presentasi yang menarik dalam bentuk audio dan visual (video singkat, poster, salindia, peta pemikiran, penjelasan bergambar, atau yang lain).
2. Kelompok yang lain dipersilahkan untuk bertanya dan memberikan komentar terhadap presentasi yang telah dilaksanakan.
3. Seluruh mahasiswa menyimak tanggapan kelompok dan mengomunikasikan kembali secara kontinyu terhadap pernyataan, saran, kritik, pertanyaan, atau sanggahan dari kelompok lainnya.
4. Setiap mahasiswa melakukan refleksi mengenai kegiatan hari ini.



E. Elaborasi Pemahaman

Dalam bagian ini, mahasiswa akan menggali lebih dalam untuk menguraikan pemahaman nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila, sebagai fondasi utama dalam membangun literasi antikorupsi. Melalui elaborasi ini, diharapkan mahasiswa dapat merinci setiap aspek nilai-nilai moral yang dimiliki Pancasila dan membawa pemahaman tersebut ke dalam konteks pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat merasakan kekayaan moral yang terkandung dalam Pancasila serta menemukan aplikasi konkritnya dalam upaya membangun literasi antikorupsi sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi ideologi bangsa Indonesia.

Elaborasi pemahaman ini akan dilakukan melalui perancangan sosialisasi literasi antikorupsi di sekolah, yaitu membuat rencana dan materi untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi literasi antikorupsi berbasis Pancasila di sekolah, sesuai dengan pedoman berikut ini.

1. Rencana Kegiatan:

- a. Rancang rencana kegiatan sosialisasi yang mencakup tujuan, waktu, tempat, dan metode pelaksanaan.
- b. Identifikasi sekolah sasaran tempat sosialisasi.

2. Materi Presentasi:

- a. Buatlah materi presentasi yang menyoroti nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan korupsi.
- b. Sertakan contoh kasus dan solusi berbasis Pancasila.

3. Metode Interaktif:

- a. Susun sesi interaktif seperti diskusi kelompok, role play, atau kuis yang melibatkan peserta.
- b. Pastikan siswa dapat merasakan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

4. Evaluasi Dampak:

Buatlah instrumen survey dan pedoman wawancara untuk mengukur dampak sosialisasi dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Untuk berdiskusi silakan tuliskan pertanyaan mengenai materi pada diskusi ini.

F. Koneksi Antar Materi

Bagian ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya menjalin koneksi yang erat antar materi dalam pembahasan “Pancasila sebagai Fondasi Literasi Antikorupsi: Pemahaman Nilai-Nilai Moral dalam Konteks Pembelajaran Pancasila”. Melalui pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, kita



dapat menggagas hubungan yang kokoh antara konsep-konsep tersebut dan mengaplikasikannya secara relevan dalam konteks pembelajaran. Dengan demikian, koneksi yang kuat antar materi tidak hanya akan memperkaya pemahaman kita tentang Pancasila, tetapi juga akan memberikan landasan kuat untuk mengembangkan literasi antikorupsi sebagai wujud nyata dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi nasional kita.

Koneksi materi ini dapat ditelusuri dari beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana konsep literasi antikorupsi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila?
2. Apa peran nilai-nilai moral dalam Pancasila dalam membentuk kesadaran anti-korupsi?
3. Bagaimana literasi antikorupsi dapat membantu dalam menggali akar nilai-nilai moral dalam Pancasila?
4. Sejauh mana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk kesadaran anti-korupsi di masyarakat?
5. Bagaimana pengenalan konsep literasi antikorupsi dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai moral Pancasila?
6. Apa saja strategi yang dapat digunakan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila guna mencegah terjadinya korupsi?
7. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat mempengaruhi budaya organisasi dalam upaya pencegahan korupsi?
8. Sejauh mana pemahaman terhadap nilai-nilai moral Pancasila dapat mendukung upaya literasi antikorupsi di tingkat individu?
9. Bagaimana literasi antikorupsi dapat membantu dalam membangun komitmen masyarakat terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila?
10. Apa saja konkretnya langkah-langkah yang dapat diambil dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi?

G. Aksi Nyata

Buatlah rancangan sosialisasi Literasi Antikorupsi di Sekolah! Rancangan tersebut harus memuat tujuan literasi antikorupsi, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman literasi antikorupsi di kalangan siswa sekolah melalui kegiatan sosialisasi di Sekolah PPL.



TOPIK 2

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: TANGGUNGJAWAB SOSIAL PELAJAR PANCASILA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Durasi	3 Pertemuan
Capaian Pembelajaran	Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa dapat: <ol style="list-style-type: none">1. Memahami peran guru dan siswa sebagai pendidik dan pelajar Pancasila dalam pemberantasan korupsi2. Membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi guru serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai <i>agent of change</i> bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Korupsi sering kita dengar dalam berbagai informasi bahkan sudah tersebar ke berbagai lini kehidupan. Korupsi mampu merusak tatanan kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Siapa saja yang melakukan korupsi? Siapa yang bertanggungjawab? Bagaimana caranya memberantas korupsi? pertanyaan ini tentu dapat dijawab, Siapapun saat ini bisa melakukan korupsi, namun siapapun juga bisa melawan korupsi dimulai dari kita, sekitar kita, bahkan bisa dimulai dari hal terkecil. “Korupsi” sebenarnya dekat dengan pengalaman sehari-hari dan berawal dari perilaku koruptif yang dibiasakan sejak dini, pembiasaan ini akan menjadi tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, anak, dan keluarga. Kalau diri sendiri dan keluarga tidak bersih, bagaimana mungkin seorang pejabat bisa menertibkan bawahan yang terlibat kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus menguatkan peran masyarakat dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama masyarakat bisa melakukan 1001 aksi melawan korupsi di Indonesia. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah melaporkan tindak pidana korupsi. Sebagian besar kasus yang terungkap di KPK merupakan hasil dari pengaduan masyarakat termasuk kasus-kasus besarnya. Kita tidak perlu takut lagi untuk melaporkan tindak pidana korupsi dan mulai melawan korupsi bersama-sama.



A. Mulai dari Diri

Untuk melawan korupsi, setiap individu dapat melakukan pendidikan antikorupsi. Sebelum berdiskusi lebih lanjut mengenai topik ini, mari simak dan respon pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Setiap individu tentu saja pernah melawan korupsi

Ceritakan pengalaman menarik Anda, ketika Anda menjadi seorang yang berusaha menolak adanya perbuatan curang. contoh perbuatan curang adalah saat menjadi mahasiswa melakukan plagiasi dalam menuliskan tugas-tugasnya. (Cerita diharapkan memuat gambaran kondisi pada saat itu, upaya apa yang Anda lakukan untuk dapat memahami bahwa perbuatan curang itu termasuk korupsi, dan apa saja yang Anda lakukan agar tidak mengulanginya kembali).

2. Saat melakukan perbuatan curang, Anda menyadari bahwa perbuatan curang merupakan perbuatan yang tidak baik. Menurut Anda, apa yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan itu? jika Anda berada di posisi Guru yang mendapati peserta didik melakukan plagiasi atau mencontek atau perbuatan curang apa yang harus dilakukan?



B. Eksplorasi Konsep

1. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk tanggung jawab sosial terhadap pemberantasan korupsi.

a. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan *Korupsi*. Menurut Bank Dunia korupsi adalah pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi. Ini merupakan definisi yang sangat luas dan mencakup tiga unsur korupsi yang digambarkan dalam akronim KKN (*Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*) (N. Kusuma dan Fitria Agustina, 2003 dalam Mansyur Semma, 2008: 33). Secara harfiah, pengertian korupsi dapat berarti: a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kekejaman dan ketidakjujuran. b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Menurut *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut terdapat tiga unsur, yaitu: a. Menyalahgunakan kekuasaan. b. Kekuasaan yang dipercayakan (baik dalam sektor publik maupun swasta). c. Keuntungan pribadi (dalam konteks ini, pribadi dapat pula dimaksudkan kepada keluarga atau teman-temannya).

Berdasarkan kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dapat merusak tatanan kehidupan dengan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan diri sendiri agar dapat memperkaya diri.

b. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan pada semua satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa, dan pemberdayaan warga Negara. Sedangkan misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membentuk warga Negara yang baik, yakni warga Negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum dan moral.



Menurut Udin. S Winataputra (2013:21) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki salah satu misinya sebagai pendidikan nilai. Dalam proses pendidikan nasional PKn pada dasarnya merupakan wahana pedagogis pembangunan watak dan karakter bangsa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa PKn merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter. Dari sisi karakteristik, PKn berisi pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan serta tentunya juga membina karakter warga negara melalui penanaman nilai kejujuran sebagai ruh sikap dan perilaku antikorupsi.

Dari sisi sasaran, PKn mengarah pada terbentuknya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, menaati peraturan yang berlaku, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, berpikir kritis, inovatif, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta mendorong sikap antikorupsi.

Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 ruang lingkup mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut:

- 1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 2) Norma, Hukum, dan Peraturan
- 3) Hak Asasi Manusia (HAM)
- 4) Kebutuhan warga Negara
- 5) Konstitusi Negara
- 6) Kekuasaan dan politik
- 7) Pancasila
- 8) Globalisasi

Sedangkan tujuan dari mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut:

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai



warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis menurut Winataputra (2013) merupakan misi suci dari Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Menurut Sapriya dan Winataputra (2013: 2), Pendidikan Kewarganegaraan mengemban tiga fungsi pokok sebagai pendidikan demokrasi, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, dan mendorong partisipasi warga negara. Ketiganya akan menciptakan kriteria warga negara yang baik (*good citizen*) dan orang yang baik (*good man*). Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pada semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Pasal 37). Ketentuan ini diperkuat lagi pada pasal 37 bagian Penjelasan dari Undang-Undang tersebut, maka kedudukan pendidikan kewarganegaraan sebagai studi tentang bagaimana warga negara itu berperan baik sebagai individu atau kelompok untuk berpikir merasakan, bertindak dan percaya terhadap suatu sistem dalam organisasi masyarakat semakin jelas dan mantap. Sehingga masalah korupsi dapat dicegah dan diminimalisir perkembangannya di Indonesia.

c. Peran Kewarganegaraan dalam pemberantasan Korupsi

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Korupsi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling korup di Asia bahkan di dunia. Di level ASEAN Indonesia menduduki urutan kelima dari sepuluh negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penyakit kronis dan pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Menyadari hal tersebut, pemerintah saat ini gencar melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi ditempuh dengan melakukan penegakkan hukum terhadap para koruptor sedangkan dalam hal pencegahan korupsi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 28 melalui jalur pendidikan, yaitu dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih lanjut disingkat dengan PKn.

Hal yang paling utama yang harus dilakukan setelah mengetahui dan memahami korupsi yakni mempelajari lebih lanjut mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dalam pengamalannya, dengan cara: (Mochammad Emir Sasmita, 2013: 5-6).



- 1) Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dalam ranah politik:
 - a) Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama.
 - b) Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran.
 - c) Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih.Implementasinya dalam ranah sosial:
 - a) Tidak ingkar janji atau menepati janji
 - b) Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan
 - c) Tidak nepotisme
 - d) Tidak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat dan curang.Implementasinya dalam ranah ekonomi
 - a) Melakukan persaingan secara sehat
 - b) Tidak melakukan suap
 - c) Tidak melakukan pemborosan sumber daya
 - d) Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi barang, jasa, maupun dana.Implementasinya dalam ranah hukum:
 - a) Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, dan barang
 - b) Tidak melakukan pemalsuan
 - c) Tidak melakukan pencurian dan disiplin dalam melakukan segala hal
 - d) Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain
 - e) Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat keputusan
 - f) Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas negara
 - g) Tidak memberikan atau menerima gratifikasi
 - h) Tidak menyalahi atau melanggar aturan yang ada
- 2) Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi manusia (HAM).

Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia (aspek hukum). Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain.
- 3) Memahami hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Secara singkat dapat disimpulkan dalam poin sebagai berikut:
 - a) Memahami pengertian hukum
 - b) Mempelajari hakikat hukum bagi warga negara Indonesia



- c) Mengetahui unsur-unsur hukum
 - d) Mengerti sumber-sumber hukum
 - e) Memahami tujuan dibuatnya hukum
 - f) Mengerti tata urutan hukum
 - g) Memahami pentingnya hukum bagi warga negara
 - h) Diberikan contoh perilaku pelanggaran hukum sebagai bagian tindakan korupsi.
- 4) Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang yang melakukan korupsi berarti melanggar hukum, melanggar HAM, melanggar kepentingan umum, dan tidak bertanggungjawab.

Sikap dan perilaku anti korupsi merupakan hal yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian dengan terselenggaranya mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal, para peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa dapat mendorong sikap anti korupsi dengan memahami nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945.

2. Kontribusi pelajar Pancasila dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi.

a. Kontribusi Pendidikan Antikorupsi dalam proses pembelajaran

Pendidikan anti korupsi adalah sistem pembelajaran yang memberikan pemahaman terhadap tindakan tidak terpuji yaitu korupsi. Implementasi pendidikan anti korupsi sangat efektif dengan melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan proses pembentukan karakter dan perubahan yang terjadi pada siswa. Melalui pendidikan terukur dengan baik dan dalam pencegahan anti korupsi (Depdiknas, 2009: 3). Pendidikan anti korupsi adalah pemahaman pencegahan terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan dengan cara pendidikan formal dan non formal, pendidikan anti korupsi tidak hanya pengenalan nilai-nilai anti korupsi, tetapi terus diberlakukan kelanjutan tentang nilai-nilai yang menjadi kebiasaan sehari-hari (Nurdin, 2004: 178).

Pendidikan Antikorupsi sangat diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, sebagai upaya reformasi kultur politik melalui sistem pendidikan untuk melakukan perubahan kultural yang berkelanjutan. Melalui pengembangan kultur sekolah diharapkan siswa siswi memiliki modal sosial yang membiasakan berperilaku anti korupsi. Saat itulah anak dapat memahami persoalan sebab akibat yang bersifat konkret, Profil pelajar Pancasila yang menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, kerja keras



dan mandiri dan peduli dalam masyarakat dan menjadi suri teladan dalam menciptakan masyarakat anti korupsi (Bahri, 2008: 6).

Pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi mempunyai hambatan, yaitu ketika diri belum menyadari akan pentingnya pendidikan anti korupsi, maka materi yang disampaikan tidak bisa diterima dan sia-sia (Kristiono, 2018). Implementasi pendidikan anti korupsi perlu dukungan dari lingkungan sekitar, sehingga implementasi dalam lingkungan sekolah dapat terlaksana dengan baik. Usia sekolah dasar adalah usia yang tepat memberikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sehingga mudah diingat dalam kegiatan sehari-hari. Penghambat implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dasar yaitu kurang pemahannya guru dengan pembelajaran anti korupsi secara konkrit, pendidikan anti korupsi khusus perlu disampaikan dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik mudah mengingat dan melaksanakannya di lingkungan sekitar dan di lingkungan belajarnya.

Implementasi pendidikan anti korupsi memiliki unsur pelaksanaan dengan integrasi mata pelajaran. Muatan pembelajaran yang berhubungan dengan implementasi anti korupsi dengan tujuan pembelajaran siswa mampu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan paham dengan nilai-nilai anti korupsi (Asyafiq, 2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan nilai-nilai untuk membangun perilaku anti korupsi, yang terjadi akibat tidak konsisten pada nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, konsumtif yang menjadikan sikap dan perilaku hanya dengan jalan pintas, KPK mengembangkan nilai-nilai anti korupsi (KPK, 2008).

Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dasar yang masih jauh dari yang diharapkan karena karakter yang ditanamkan belum sampai kepada siswa. Ada beberapa cara yang bisa ditanamkan dalam perilaku anti korupsi,

- 1) Menanamkan nilai kejujuran dengan membiasakan siswa tidak mengambil milik orang lain, menghargai nilai ujian yang mereka dapat dengan hasil usahanya dalam mengerjakan tidak dengan mencontek,
- 2) Menanamkan sikap kesederhanaan, dengan cara bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki,
- 3) Menanamkan perilaku untuk dapat menghadapi masalah, dengan cara tidak merugikan dan menyakiti orang lain,
- 4) Memiliki rasa tanggung jawab dengan apapun yang sudah dilakukan,
- 5) Menanamkan perilaku disiplin, dengan menghargai waktu,
- 6) Menanamkan perilaku keadilan dengan mengajarkan untuk bisa berbagi kepada sesama temannya,



- 7) Menumbuhkan rasa kepedulian dengan rasa empati kepada orang lain,
- 8) Menanamkan perilaku kerja sama, agar apapun yang dilakukan secara bersama dapat diselesaikan sesuai tujuannya.

Nilai integritas ini ditanamkan sejak dini, untuk membangun karakter perilaku anti korupsi dan mencegah tindak korupsi di masa yang akan datang (Agus & Delian, 2015).

b. Kontribusi Profil Pelajar Pancasila dalam mencegah korupsi

Profil Pelajar Pancasila merupakan alternatif upaya menyiapkan generasi emas dengan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, serta mampu menghadapi tantangan global. Akan tetapi implementasinya saat ini masih terkendala khususnya terhadap pemahaman guru di sekolah dasar. Dimensi profil pelajar pancasila terdiri dari,

- 1) beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia,
- 2) mandiri,
- 3) bergotong-royong,
- 4) berkebinekaan global,
- 5) bernalar kritis,
- 6) kreatif.

Implementasi profil pelajar pancasila di sekolah dasar masih kurang optimal sehingga harapannya dapat berjalan secara baik sesuai harapan. Sehingga perlunya pendampingan dalam pemberian pemahaman kepada guru di sekolah dasar dalam implementasi profil pelajar pancasila. Profil pelajar pancasila yang dimiliki siswa sekolah dasar mempunyai peranan sebagai simbol dari siswa indonesia yang memiliki budaya, karakter serta nilai-nilai pancasila (Novera et al., 2021). Upaya profil pelajar pancasila dalam mencegah korupsi diantaranya:

- 1) Memiliki Integritas yang Kuat:

Jaga integritas pribadi dengan menetapkan standar moral dan etika yang tinggi. Pahami nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Tetaplah konsisten dengan prinsip-prinsip ini dalam setiap tindakan dan keputusan yang Anda ambil.

- 2) Tingkatkan Kesadaran tentang Korupsi:

Pendidikan dan pemahaman yang baik tentang korupsi penting untuk mencegahnya. Baca dan pelajari tentang dampak korupsi terhadap masyarakat dan ekonomi. Ikuti kampanye anti-korupsi, seminar, atau pelatihan yang berkaitan dengan masalah ini.



3) **Transparansi dan Akuntabilitas:**

Jaga transparansi dalam segala aspek hidup Anda. Hindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan sampaikan informasi dengan jujur dan terbuka. Pertanggung Jawabkan tindakan Anda dan beri tahu orang lain tentang hal itu.

4) **Tolak Suap:**

Tetapkan prinsip untuk menolak dan melaporkan tawaran suap. Jika Anda berada dalam situasi di mana suap ditawarkan, tegakkan integritas Anda dan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang yang berwenang.

5) **Berperan Aktif dalam Pemberantasan Korupsi:**

Jika ada mekanisme atau lembaga anti-korupsi di negara atau wilayah Anda, berpartisipasi dalam program atau kegiatan yang mereka adakan. Laporkan tindakan korupsi yang Anda saksikan dan bantu membangun budaya anti-korupsi dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman Anda.

6) **Mendukung Reformasi Sistem:**

Dukung reformasi dan perbaikan sistem yang dapat mengurangi celah untuk korupsi. Ikuti perkembangan kebijakan dan upaya pemberantasan korupsi di negara atau wilayah Anda. Berpartisipasi dalam pemilihan umum dan mendukung pemimpin yang jujur dan berkomitmen untuk memerangi korupsi.

Memberantas korupsi tidak mungkin hanya dilakukan melalui jalur hukum saja, melainkan dapat ditambah dengan jalur pendidikan yaitu dengan cara menghadirkan Pendidikan Kewarganegaraan pada semua jenjang pendidikan sebagai mata pelajaran yang menjadi wahana bagi pembentukan watak dan karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian dengan terselenggaranya mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal, para peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa dapat mendorong sikap anti korupsi dengan memahami nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu untuk mengantisipasi korupsi oleh pejabat publik perlu diadakannya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara, agar warga negara dengan bekal informasi dan pengetahuannya tentang masalah kehidupan politik kenegaraan memungkinkan warga negara tersebut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. Sehingga dengan adanya pendidikan politik dan kewarganegaraan.

Penting untuk diingat bahwa mencegah korupsi adalah tanggung jawab bersama. Dengan berperan sebagai individu yang jujur dan bertanggung jawab, kita



dapat memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang bebas dari korupsi.

C. Ruang Kolaborasi

Setelah mempelajari Peran Pendidikan Kewarganegaraan dan kontribusi Profil pelajar pancasila dalam pemberantasan korupsi, silakan bekerja dalam kelompok (3-4 orang) untuk memberikan pendapat atau solusi pada kasus- kasus berikut (waktu 45 menit).

Tugas 1 Memberikan Tanggapan terhadap Kasus di Ruang Kelas

Bacalah kasus-kasus berikut ini. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan berdiskusi bersama kelompok. Gunakan bekal pengetahuan anda mengenai konsep yang telah dipelajari untuk memberikan jawaban yang informatif dan solutif.

1. Kasus I

Peserta didik berbohong tentang harga alat-alat tulis atau kebutuhan sekolah dan meminta dana yang lebih dari harga sebenarnya kepada orang tua untuk membeli barang-barang tersebut. Bila dibiarkan, seorang peserta didik akan terbiasa untuk selalu menaikkan angka pada anggaran dari harga yang sebenarnya sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih saat bekerja nanti.

Bagaimana pendapat anda terhadap peserta didik tersebut? Dan bagaimana tanggapan anda terhadap masalah di atas? Sebagai calon guru, apa yang anda lakukan untuk memberantas tindakan tersebut?

2. Kasus II

Peserta didik memalsukan tanda tangan buku penghubung orang tua dan guru, hal ini akan berpotensi menumbuhkan bibit penggelapan surat berharga seperti memalsukan buku-buku atau dokumen barang bukti, dsb. Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap permasalahan di atas? sebagai calon guru, bagaimana cara anda untuk mengurangi pemalsuan tanda tangan pada peserta didik? sebagai calon guru, upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi tindakan tersebut?

3. Kasus III

Orang tua yang memberikan sejumlah uang kepada pihak sekolah supaya anaknya diterima saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), atau memberikan hadiah kepada guru supaya nilai anaknya baik merupakan bentuk suap menyuap dalam sekolah. Apakah benar tindakan tersebut? Sebagai calon guru, apa kalian akan menerima hadiah tersebut? jelaskan alasanmu.



4. Kasus IV

Pihak sekolah menyewa bus yang kurang baik untuk kegiatan di luar kelas (piknik, *outing class*, *study tour*), atau menyewa tenda bocor untuk acara sekolah dengan harga yang lebih rendah dari yang dianggarkan dan kualitas yang tidak sesuai (*mark-up*) adalah bentuk perbuatan curang yang membahayakan orang lain demi kepentingan pribadi. Bagaimana pendapatmu terhadap tindakan di atas? Upaya apa yang anda lakukan jika kalian menemukan kejadian di atas?

5. Kasus V

Orang tua/siswa memberikan hadiah kepada guru/wali kelas merupakan salah satu bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini berpotensi menimbulkan subjektivitas dari guru terhadap anak/siswa tersebut, yang dapat mengarah pada favoritisme. Apakah benar tindakan tersebut? Sebagai calon guru, apa kalian akan menerima gratifikasi tersebut? Jika Anda melihat praktik tersebut di sekolah, apa yang anda lakukan?

D. Demonstrasi Kontekstual

Setelah menyelesaikan tugas secara berkelompok, saat ini Anda akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok Anda melalui metode galeri belajar (*gallery walk*) atau forum diskusi. Perhatikan petunjuk berikut untuk memandu Anda bekerja.

1. Buatlah materi presentasi yang menarik dalam bentuk audio dan visual (video singkat, poster, salindia, peta pemikiran, penjelasan bergambar, atau yang lain) dalam waktu 15 menit.
2. Masing-masing kelompok wajib memberikan satu pertanyaan, pernyataan, saran, kritik, sanggahan, atau lainnya, kepada kelompok lain.
3. Ketua kelompok membagi tugas kepada seluruh anggota kelompok (termasuk dirinya sendiri) secara merata, untuk memberikan tanggapan di forum diskusi.
4. Seluruh mahasiswa menyimak tanggapan kelompok dan mengomunikasikan kembali secara kontinyu terhadap pernyataan, saran, kritik, pertanyaan, atau sanggahan dari kelompok lainnya.
5. Setiap mahasiswa melakukan refleksi mengenai kegiatan hari ini.

E. Elaborasi Pemahaman

Setelah mengkaji secara mendalam dan mengaplikasikan berbagai macam peran pendidikan antikorupsi melalui materi pendidikan kewarganegaraan dan kontribusi profil pelajar pancasila. Anda diminta untuk mengamati secara langsung pemberantasan

korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan dan profil pelajar pancasila dalam konteks ruang kelas yang sesungguhnya secara individu.

1. Tugas 2 Melakukan Analisis pengamatan dari Video

Analisislah video berikut ini:



[ACFFEST 2019: FILM RAPOR](#)

- Tuliskan temuan yang Anda amati dan aspek-aspek pada video yang mencakup praktik-praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah serta upaya dalam melakukannya pemberantasannya.
- Tuliskan refleksi anda pada kolom bagian refleksi sesuai dengan petunjuk.

F. Koneksi Antara Materi

Setelah melakukan pengamatan terhadap peserta didik dan praktik pemberantasan korupsi di sekolah, Anda diminta untuk menemukan hubungan antara peran pendidikan kewarganegaraan dan kontribusi profil pelajar pancasila dengan pemberantasan korupsi di lingkungan sekolah. Gunakanlah pertanyaan-pertanyaan panduan berikut untuk membantu berpikir

- Menurut Anda, sejauh mana Pendidikan Antikorupsi melalui materi pendidikan kewarganegaraan diajarkan lingkungan sekolah? Elaborasi jawab Anda.
- Menurut Anda, apa saja hal yang harus dipertimbangkan oleh anda sebagai seorang calon guru untuk menyiapkan generasi Indonesia bebas dari korupsi?
- Usaha apa yang anda lakukan di sekolah untuk memberantas korupsi melalui materi pendidikan kewarganegaraan?

G. Aksi Nyata

Setelah memahami beragam konsep dan melakukan pengamatan langsung tentang penerapan konsep-konsep tersebut, silakan menuliskan refleksi berdasarkan



hasil pengamatan yang dilakukan. Gunakanlah pertanyaan- pertanyaan berikut sebagai panduan.

1. Menurut Anda, apakah proses pembelajaran kewarganegaraan sudah mampu untuk mengurangi kasus korupsi di sekolah? Elaborasi jawaban Anda dengan menceritakan hasil pengamatan yang telah dilakukan.
2. Menurut Anda, apakah proses pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan upaya pendidikan antikorupsi? Elaborasi jawaban Anda dengan menceritakan hasil pengamatan yang telah dilakukan.
3. Menurut Anda, apakah sekolah sudah mengimplementasikan praktik pencegahan korupsi? Elaborasi jawaban Anda dengan menceritakan hasil pengamatan yang telah dilakukan.

UTS

1. Buatlah proyek sosialisasi Literasi Antikorupsi di Sekolah dalam bentuk poster yang telah dirancang pada aksi Nyata! (Poster di tempel di lingkungan sekolah).
2. Dokumentasikanlah sosialisasi Literasi Antikorupsi di Sekolah! (dalam bentuk foto-foto).
3. Tulislah respon dari sosialisasi yang dilakukan dan buatlah rencana tindak lanjut dari respon tersebut!



TOPIK 3

BAHASA INDONESIA SEBAGAI PENGHELA LITERASI ANTI KORUPSI

Durasi	3 Pertemuan
Capaian Pembelajaran	Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa dapat: 1. Menggunakan konsep kebahasaan dalam berliterasi antikorupsi 2. Menyusun proyek sederhana literasi antikorupsi di sekolah dalam bentuk multimoda (infografis/ video) dengan konsep kebahasaan

Sebagai calon guru tentunya Anda memiliki gambaran suasana kelas dan berbagai aktivitas di kelas maupun luaran kelas yang tidak lepas dari embrio-embrio lahirnya kebiasaan korupsi. Melihat kondisi tersebut Anda tentu menyadari perlunya mengenalkan berbagai literasi antikorupsi sehingga peserta didik mengetahui dan menyadari sikap dan perilaku yang dilakukan adalah karakter yang tidak sesuai. Oleh karena itu, perlu mengoptimalkan konsep kebahasaan agar dapat menjadi penghela berbagai kemampuan untuk berliterasi antikorupsi.

A. Mulai dari Diri

Pernahkan Anda menyadari jika perilaku korupsi dapat terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian? Lingkungan rumah dan sekolah menjadi sarana belajar anak untuk membentuk karakter Pancasila dan manusia yang beradab. Proses pembelajaran yang bermakna tentu juga akan membantu membentuk pribadi yang berkarakter. Untuk mendukung proses tersebut, guru harus mengenal dan mempelajari berbagai konsep kebahasaan yang dapat membantu menguatkan literasi antikorupsi. Sebelum berdiskusi lebih lanjut mengenai topik ini, mari simak dan respon pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Setiap individu yang menempuh Pendidikan formal ataupun informal dipastikan pernah mendapatkan tugas ataupun pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan dikumpulkan.

Ceritakanlah pengalaman Anda semasa sekolah baik di tingkat SD/SMP/SMA saat mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah! Pernahkah Anda mengalami atau melakukan perbuatan meminjam hasil kerja teman untuk ditiru? Atau mengambil hasil



kerja teman untuk diakui sebagai hasil kerja Anda? (Cerita diharapkan memuat gambaran kondisi pada saat itu dan apa reaksi Anda jika Anda adalah korban yang meminjamkan atau yang diambil hasil kerjanya).

2. Saat pembelajaran berlangsung, seorang guru menyadari bahwa peserta didik di dalam kelas yang diajarnya selalu datang terlambat. Peserta didik tersebut selalu beralasan terlambat karena membantu orang tuanya berjualan. Setelah dicari tahu kebenaran kasus tersebut, diketahui bahwa peserta didik tersebut berbohong karena ia sengaja duduk di kantin agar tidak ikut kegiatan literasi di awal KBM.

Menurut Anda, apakah sikap/perilaku peserta didik tersebut merupakan bagian dari kebiasaan korupsi? Jika Anda menjadi guru, apa yang akan Anda lakukan agar peserta didik tersebut tidak mengulangi kesalahan dan perilaku tersebut lagi?

3. literasi antikorupsi dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah satunya menggunakan media sosial agar mudah tersampaikan kepada peserta didik. Jika Anda sebagai guru SD/SMP/SMA, tugas atau aktivitas apa yang dapat Anda lakukan agar peserta didik dapat melakukan literasi antikorupsi dengan tepat di media sosial?



4. Coba ingat-ingat pengalaman Anda ketika sekolah (SD/SMP/SMA), guru atau aktivitas apa yang dilakukan di sekolah yang dapat menguatkan pemahaman antikorupsi Anda? Ceritakan pengalaman menarik Anda sehingga dapat membagikan literasi antikorupsi yang pernah Anda dapatkan saat menjadi pembelajar!

B. Eksplorasi Konsep

1. Konsep Bahasa dan Fungsi Bahasa

a. Konsep Bahasa

Menurut Kridalaksana (2013), bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Beberapa hal berikut merupakan aturan bahasa. (1) Sistem lambang yang bermakna dapat dipahami secara luas oleh orang-orang yang menggunakannya. (2) Sistem bahasa konvensional didasarkan pada kebiasaan orang-orang yang menggunakannya. (3) Lambang sebagai huruf (fonemis), yang terdiri dari A hingga Z: 26 huruf, dapat menghasilkan kalimat kata, bentukan kata, frase, klausa, dan yang sangat produktif. (4) Sistem lambang yang terbatas dapat menghasilkan kata, bentukan kata, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas. (5) Sistem lambang Bahasa adalah unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh komponen sistem lambang (Kushartanti dkk., 2003).

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan pendapat, argumen, dan perspektif seseorang kepada orang lain. Akibatnya, bahasa memainkan peran sosial yang penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat secara keseluruhan (Keraf, 2004). Untuk berkomunikasi dengan baik, baik komunikator maupun komunikan harus mahir berbahasa. Dalam proses berkomunikasi, mereka bergantung pada bahasa untuk membedakan dan membedakan setiap masalah sosial. Pengguna menentukan bahasa. Bahasa memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini.



Hubungan antara bahasa dan komunikasi sangat erat, seperti yang ditunjukkan oleh pengertian bahasa menurut rumusan linguistik dan kesamaan komunikasi, yang menggambarkan bahasa sebagai alat atau media komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Sebaliknya, membutuhkan media komunikasi, yaitu bahasa. Bahasa adalah pesan yang biasanya dikomunikasikan melalui ekspresi dalam berbagai kegiatan tertentu (Noermanzah, 2017). Bahasa, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Dilihat dari pengertian kamus, dapat dipahami bahwa bahasa juga dapat berfungsi sebagai representasi bunyi, seperti bukan pada nada. Fungsi atau manfaat bahasa sangat berbeda dari keduanya.

1) Fungsi Bahasa

Chaer (2012) menyatakan bahasa memiliki berbagai fungsi yang beragam dan kompleks karena digunakan untuk berbagai keperluan dalam interaksi sosial dan ekspresi pikiran. Berikut adalah beberapa fungsi bahasa utama:

a) Fungsi Komunikatif:

Pemberian dan Penerimaan Informasi: Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu individu ke individu lainnya. Pertanyaan dan Jawaban: Berkomunikasi untuk mendapatkan informasi atau memberikan jawaban.

b) Fungsi Ekspresif:

Ekspresi Diri: Bahasa digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pemikiran individu.

c) Fungsi Sosial:

Identitas Kelompok: Bahasa digunakan untuk memperkuat identitas kelompok sosial atau budaya. Pemberian Peran Sosial: Melalui bahasa, individu menunjukkan peran sosial mereka dalam masyarakat.

d) Fungsi Regulatif:

Pemberian Perintah atau Larangan: Bahasa digunakan untuk memberikan instruksi atau melarang tindakan tertentu. Penyusunan Aturan dan Norma: Bahasa digunakan untuk membentuk aturan, norma, dan tata tertib.



e) Fungsi Interaksional:

Interaksi Sosial: Bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam situasi sosial. Pembentukan Hubungan: Bahasa membantu dalam membentuk dan memelihara hubungan sosial.

f) Fungsi Imajinatif atau Kreatif:

Penciptaan Karya Seni dan Sastra: Bahasa digunakan untuk menciptakan puisi, cerita, lagu, dan karya seni lainnya. Ekspresi Kreativitas: Melalui bahasa, individu dapat mengekspresikan ide-ide kreatif dan imajinatif.

g) Fungsi Kognitif:

Pemikiran dan Pemecahan Masalah: Bahasa membantu dalam merumuskan dan mengartikulasikan pemikiran serta solusi masalah. Pengembangan Konsep: Bahasa digunakan untuk mengembangkan dan menyampaikan konsep dan ide.

h) Fungsi Historis:

Pengabadian Sejarah: Bahasa digunakan untuk menyampaikan cerita, narasi, dan sejarah melalui generasi.

i) Fungsi Ritual atau Keagamaan:

Upacara Keagamaan: Bahasa digunakan dalam upacara keagamaan dan ritual untuk menyampaikan doa, mantra, atau ajaran keagamaan.

j) Fungsi Estetis atau Keindahan:

Penghormatan terhadap Kecantikan: Bahasa digunakan untuk mengungkapkan apresiasi terhadap keindahan dalam berbagai bentuk, termasuk kata-kata, seni visual, dan musik.

Fungsi-fungsi ini saling terkait dan menciptakan keberagaman cara bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Unsur Kaidah Kebahasaan

Dalam kaidah kebahasaan, ada beberapa unsur yang digunakan dalam membentuk suatu tata bahasa yang baik dan benar. Rahman (2017) menyebutkan bahwa ada beberapa macam unsur yang digunakan dalam kaidah kebahasaan. Berikut unsur-unsur kaidah kebahasaan.

a) Kata Rujukan

Kata rujukan adalah jenis kata yang digunakan sebagai rujukan kepada suatu objek tertentu atau merujuk pada bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Contohnya pada kalimat "Perempuan itu tinggal di Jakarta. Di sana, ia bekerja sebagai karyawan



perusahaan". Kata "di sana" pada kalimat tersebut merupakan kata rujukan yang merujuk pada tempat, yakni Kota Jakarta.

b) Frasa

Frasa merupakan istilah yang terbentuk dari gabungan beberapa kata yang dapat berperan sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap.

c) Konjungsi

Konjungsi atau kata penghubung adalah jenis kata yang berfungsi untuk menyambungkan suatu frasa atau kalimat dengan frasa atau kalimat lainnya. Contoh konjungsi adalah dan, tetapi, namun, akan tetapi, sebab, dan lain-lain. Setiap konjungsi memiliki makna tersendiri sehingga harus digunakan sesuai dengan penggunaannya.

d) Preposisi

Preposisi atau kata depan merupakan jenis kata yang berguna untuk merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Contoh preposisi adalah dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, sampai, seperti, untuk, bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, selama, seluruh, dan lain-lain.

e) Kata Baku

Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ketentuan pedoman kebahasaan yang telah ditetapkan, seperti PUEBI. Kata baku dalam bahasa Indonesia telah termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

f) Adjektiva

Adjektiva atau kata sifat merupakan jenis kata yang menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik dari suatu objek. Contohnya, seperti besar, kecil, pendek, tinggi, dan lain-lain.

g) Verba

Verba atau kerja adalah suatu kata yang menjelaskan suatu proses atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu objek. Contoh kata verba adalah memasak, bermain, membaca, menulis, dan lain-lain.

h) Majas

Majas merupakan cara menggambarkan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau sederhananya, majas dapat diartikan sebagai kata kiasan. Contohnya, pada kalimat "Suara Rani hampir memecahkan gendang telinga" yang berarti suara Rani sangatlah keras. Suara sangat keras atau kencang dikiasakan dengan "hampir memecahkan gendang telinga".



i) Adverbia

Adverbia atau yang sering disebut kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Contohnya, sangat, lebih, tidak, dan lain-lain.

j) Kalimat

Kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat disusun oleh beberapa jenis kata yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga membentuk suatu satuan bahasa.

k) Paragraf

Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang mengandung satu ide pokok dan merupakan bagian dari sebuah karangan utuh yang mendukung topik pembicaraan karangan tersebut. Dalam satu paragraf terdapat satu kalimat utama dan satu atau lebih kalimat penjelas seperti halnya wacana. setiap kalimat yang berurutan harus memiliki hubungan timbal balik dan tidak boleh saling bertentangan. Kalimat-kalimat yang menyusun sebuah paragraf juga harus bersifat utuh.

l) Wacana

Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Kontek adalah sesuatu yang menyertai, bersama dan mendukung keberadaan wacana itu sendiri.

2. Literasi Dasar

Literasi dasar merujuk pada keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan seseorang untuk berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan beberapa aspek, termasuk:

a. Literasi Bahasa

Kemampuan membaca dengan pemahaman, menulis dengan jelas, berbicara secara efektif, dan mendengarkan dengan baik. Literasi bahasa adalah landasan untuk kemampuan komunikasi dan pemahaman informasi.

b. Literasi Matematika

Kemampuan dasar dalam menghitung, memahami angka, dan menerapkan konsep matematika sederhana. Ini penting untuk berbagai kegiatan sehari-hari, termasuk pengelolaan keuangan, belanja, dan pemecahan masalah sehari-hari.



c. Literasi Digital

Pemahaman dasar tentang penggunaan perangkat digital, navigasi online, serta kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi informasi dari sumber-sumber digital. Literasi digital semakin penting dalam masyarakat modern yang terhubung secara digital.

d. Literasi Kesehatan

Pemahaman dasar tentang bagaimana menjaga kesehatan pribadi, mengerti informasi kesehatan dasar, dan melakukan keputusan yang sehat. Ini termasuk pemahaman label obat, pola makan sehat, dan pentingnya aktivitas fisik.

e. Literasi Finansial

Pemahaman dasar tentang konsep keuangan, pengelolaan uang, dan kemampuan membuat keputusan keuangan yang bijak. Literasi finansial membantu seseorang mengelola anggaran, memahami pajak, dan merencanakan masa depan finansialnya.

f. Literasi Sosial dan Emosional

Kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi dengan baik, dan membangun hubungan yang sehat. Literasi sosial dan emosional membantu dalam komunikasi interpersonal dan kolaborasi.

g. Keterampilan Pekerjaan dan Karier

Pemahaman tentang keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja, termasuk keterampilan wawancara, penyusunan resume, dan keterampilan dasar dalam pekerjaan tertentu.

Literasi dasar membentuk dasar yang kuat untuk pengembangan literasi yang lebih tinggi dan berbagai aspek kehidupan. Ini adalah fondasi yang diperlukan untuk berhasil berpartisipasi dalam masyarakat modern yang semakin kompleks.

3. Bahasa sebagai Penghela Literasi

Literasi bahasa mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa secara efektif. Berikut adalah beberapa konsep kunci yang terkait:

- a. Fonologi: Ini berkaitan dengan suara dalam bahasa, termasuk pengenalan bunyi dan hubungan antara bunyi tersebut
- b. Morfologi: Menyelidiki struktur kata dan pembentukan kata, termasuk akar kata, awalan, dan akhiran.
- c. Sintaksis: Mengkaji struktur kalimat, hubungan antar kata dalam kalimat, dan aturan tata bahasa.



- d. Semantik: Berfokus pada makna kata, frasa, kalimat, dan teks secara keseluruhan.
- e. Pragmatik: Melibatkan penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif, memahami maksud pembicara, dan menanggapi dengan tepat.
- f. Ortografi: Menyangkut aturan penulisan dan ejaan kata.
- g. Kosakata (Vokabular): Melibatkan pemahaman dan penggunaan kata-kata dalam konteks yang sesuai.
- h. Keterampilan Membaca: Termasuk kemampuan membaca dengan pemahaman, mengidentifikasi ide utama, dan merinci informasi dari teks.
- i. Keterampilan Menulis: Melibatkan kemampuan menyusun ide secara jelas dan efektif dalam bentuk tulisan.
- j. Keterampilan Mendengarkan dan Berbicara: Melibatkan kemampuan memahami dan merespons informasi melalui pendengaran, serta kemampuan berbicara dengan jelas dan efektif.
- k. Literasi Media: Memahami, mengevaluasi, dan membuat media secara kritis.
- l. Literasi Digital: Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pemahaman dan produksi informasi.

Beberapa materi kebahasaan yang umumnya diajarkan dan dipelajari dalam pembelajaran bahasa:

- a. Fonologi: Pengenalan bunyi dan fonem; Pemahaman aturan intonasi dan aksent.
- b. Morfologi: Struktur kata, akar kata, awalan, dan akhiran. Pembentukan kata dan perubahan makna.
- c. Sintaksis: Struktur kalimat dan jenis-jenis kalimat. Klausa dan frase. Kesepakatan dan keselarasan gramatikal.
- d. Semantik: Makna kata dan frasa. Penggunaan kata dalam konteks. Hubungan antara kata dan makna.
- e. Pragmatik: Konteks sosial penggunaan bahasa. Maksud pembicara dan pemahaman pendengar. Norma-norma berkomunikasi.
- f. Ortografi: Aturan penulisan dan ejaan. Penggunaan tanda baca. Kosakata (Vokabular): Pengayaan kosakata. Sinonim, antonim, dan polisemi.
- g. Keterampilan Membaca: Strategi membaca. Membaca dengan pemahaman. Analisis teks dan penafsiran makna.
- h. Keterampilan Menulis: Struktur teks. Gaya penulisan. Pengembangan ide dan argumen. Keterampilan Mendengarkan dan Berbicara: Aktif mendengarkan. Menyampaikan ide secara lisan. Keterampilan berbicara di berbagai konteks.



- i. Literasi Media: Evaluasi dan analisis media. Pembuatan media secara kreatif dan efektif.
- j. Literasi Digital: Penggunaan teknologi untuk komunikasi dan informasi. Keamanan digital dan etika online.

Materi-materi ini membentuk dasar pemahaman yang komprehensif terhadap bahasa dan membantu dalam pengembangan keterampilan berbahasa secara keseluruhan. Bagi setiap materi, penting juga untuk mempraktikkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari agar pemahaman lebih mendalam dan aplikatif.

Bahasa adalah salah satu komponen penting dalam literasi, yang merupakan kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi tertulis. Literasi bahasa melibatkan pemahaman dan penggunaan bahasa dengan baik, serta kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Berikut beberapa aspek penting dari bahasa sebagai bagian dari literasi:

a. Keterampilan Membaca:

Literasi bahasa melibatkan kemampuan membaca dengan pemahaman. Ini mencakup tidak hanya mengenali huruf dan kata, tetapi juga memahami makna teks secara keseluruhan. Kemampuan membaca dengan baik membuka pintu untuk akses informasi, pengetahuan, dan pemahaman dunia.

b. Keterampilan Menulis:

Menulis adalah ekspresi dari literasi bahasa yang memungkinkan seseorang menyampaikan ide dan informasi secara tertulis. Keterampilan menulis yang baik memungkinkan seseorang mengomunikasikan pemikiran mereka dengan jelas dan efektif.

c. Kemampuan Berbicara dan Mendengarkan:

Literasi bahasa juga mencakup kemampuan berbicara dan mendengarkan dengan baik. Melalui kemampuan berbicara, seseorang dapat mengkomunikasikan gagasannya secara lisan, sementara kemampuan mendengarkan memungkinkan pemahaman yang baik terhadap pesan orang lain.

d. Pemahaman Tatabahasa dan Kosakata:

Memahami aturan tatabahasa dan memiliki kosakata yang luas adalah bagian integral dari literasi bahasa. Kemampuan menggunakan bahasa dengan benar meningkatkan kejelasan dan efektivitas komunikasi.

e. Kemampuan Kritis dan Analitis:

Literasi bahasa juga melibatkan kemampuan berpikir kritis terhadap teks yang dibaca atau diterima. Seseorang yang memiliki literasi bahasa yang baik



dapat menganalisis informasi, menilai argumen, dan membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman yang mendalam.

f. **Pemahaman Konteks Budaya:**

Literasi bahasa tidak hanya mencakup pemahaman linguistik, tetapi juga pemahaman terhadap konteks budaya di mana bahasa tersebut digunakan. Pemahaman konteks budaya membantu seseorang membaca dan menginterpretasikan teks dengan lebih baik.

Penting untuk diingat bahwa literasi bahasa bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan kritis dan kreatif yang memungkinkan seseorang berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan memperluas wawasannya.

4. Teks Opini sebagai Produk Literasi Antikorupsi

Teks opini adalah jenis teks yang menyajikan pandangan, keyakinan, atau evaluasi subjektif dari penulis terhadap suatu topik atau isu tertentu. Tujuan utama dari teks opini adalah untuk menyampaikan pendapat penulis kepada pembaca dan mempengaruhi pandangan mereka terhadap suatu hal (Ramadhanti & Yanda, 2022). Beberapa ciri khas teks opini meliputi:

1. **Subjektivitas:** Teks opini mencerminkan sudut pandang atau perasaan pribadi penulis. Ia dapat mencakup ekspresi emosi, preferensi, atau nilai-nilai pribadi.
2. **Argumen dan Pendukung:** Penulis teks opini biasanya menyajikan argumen atau alasan yang mendukung pandangannya. Ini dapat melibatkan penggunaan fakta, data, atau pengalaman pribadi untuk memperkuat posisinya.
3. **Gaya Bahasa Kreatif:** Penulis teks opini sering menggunakan gaya bahasa yang kreatif untuk menarik perhatian pembaca dan menyampaikan pesannya dengan lebih efektif. Hal ini dapat mencakup penggunaan retorika, metafora, atau bahasa yang kuat.
4. **Kebebasan Ekspresi:** Teks opini memberikan kebebasan bagi penulis untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa harus sepenuhnya objektif atau netral. Namun, tetaplah penting untuk mempertahankan integritas dengan menyajikan fakta secara akurat ketika diperlukan.
5. **Kehadiran Pembaca sebagai Sasaran:** Penulis teks opini sering menyadari kehadiran pembaca sebagai audiens target. Mereka berusaha memengaruhi pembaca, meyakinkan mereka, atau membangkitkan tanggapan emosional.
6. **Kesimpulan atau Tesis:** Teks opini sering diakhiri dengan pernyataan kesimpulan atau tesis yang merekapitulasi pandangan penulis secara singkat dan kuat.



Contoh teks opini bisa ditemukan dalam artikel editorial, kolom opini di surat kabar, blog, atau bahkan dalam bentuk ulasan produk atau film yang mencerminkan sudut pandang penulis terhadap suatu karya.

Penting untuk diingat bahwa opini bersifat subjektif dan dapat bervariasi antara individu. Pembaca juga diharapkan untuk mengembangkan pemahaman kritis mereka sendiri terhadap opini yang disajikan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang.

C. Ruang Kolaborasi

Mahasiswa yang berbahagia, di ruang kolaborasi ini silakan Anda membaca berbagai artikel, berita, atau opini mengenai kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi. Setelah itu, silakan membentuk kelompok dan mendiskusikan satu kasus korupsi yang menurut kelompok Anda penting untuk dicari solusinya. Pada langkah berikutnya, silakan menggali beragam akar masalah dari kasus korupsi yang kelompok Anda pilih. Setelah Anda berdiskusi, rumuskan solusi untuk menyelesaikan masalah dan akar masalah terkait kasus korupsi tersebut. Tuliskan hasil diskusi kelompok Anda di lembar kerja berikut. Lengkapi dengan referensi dan literatur yang mendukung argumen Anda mengenai solusi untuk menyelesaikan kasus korupsi dan akar masalahnya tersebut.

Tabel 3. Lembar Kerja Ruang Kolaborasi Topik 3

Kasus Korupsi	Akar Masalah (minimal 2 akar masalah)	Solusi (minimal 2 solusi)	Referensi (minimal 2 referensi)
Kasus korupsi yang pernah dibaca atau diperoleh dari berbagai literature	Akar masalah diperoleh dari penafsiran dari kasus korupsi yang ditentukan.	Solusi dapat berupa upaya penanggulangan berdasarkan akar masalah dari berbagai sumber.	Sumber rujukan yang dijadikan acuan menentukan solusi.

D. Demonstrasi Kontekstual

Mahasiswa yang berbahagia, berdasarkan hasil diskusi di ruang kolaborasi, silakan presentasikan lembar kerja Anda secara bergantian untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain. Kelompok yang presentasi menyiapkan hasil diskusi untuk ditampilkan sementara kelompok yang menyimak dapat menanggapi dengan memberikan konfirmasi,

memperkuat argumen, atau mengajukan pertanyaan terkait hasil diskusi dari kelompok yang menyajikan presentasi.

E. Elaborasi Pemahaman

Mahasiswa yang berbahagia, literasi antikorupsi dapat disampaikan melalui berbagai media. Salah satu media yang dapat menjadi platform untuk menyampaikan literasi antikorupsi adalah media audiovisual seperti film. Film dapat digunakan untuk menyampaikan wacana, gagasan, atau ide mengenai literasi antikorupsi dengan cara yang menyenangkan dan menghibur. Silakan simak, analisis, dan berikan komentar terhadap beberapa film pendek berikut yang mengangkat tema antikorupsi berikut.

Tabel 4. Film Pendek Anti Korupsi Topik 3

No	Judul	Tautan
1	Subur Itu Jujur	https://www.youtube.com/watch?v=CmMHBTIU5Vg&pp=ygUPa3BrIGZpbG0qcGVuZGVr 
2	Current Network	https://www.youtube.com/watch?v=UQxVU8q74Sc&pp=ygUPa3BrIGZpbG0qcGVuZGVr 

No	Judul	Tautan
3	Selamat Siang Risa	https://www.youtube.com/watch?v=8IUagtmgc2E&pp=ygUPa3BrlGZpbG0qcGVuZGVr 

Untuk berdiskusi silakan tuliskan pertanyaan mengenai materi pada diskusi ini.
Klik Reply untuk melakukan diskusi.

F. Koneksi Antar Materi

Mahasiswa yang berbahagia, setelah Anda menyaksikan beberapa film pendek bertema antikorupsi tersebut, silakan hubungkan dan refleksikan pengalaman Anda berdasarkan film yang telah Anda saksikan tersebut dengan mengaitkan dengan konsep Bahasa sebagai penghela literasi antikorupsi.

G. Aksi Nyata

Mahasiswa yang berbahagia, setelah mempelajari materi-materi sebelumnya, silakan pada aksi nyata ini Anda menyusun satu proyek sederhana mengenai literasi antikorupsi. Susunlah proyek dengan memperhatikan aspek kebahasaan yang benar! Proyek tersebut dapat Anda rancang dan sajikan melalui teks multimodal seperti artikel, infografis, video pendek, komik, atau poster dan diunggah pada media sosial!



TOPIK 4

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP KORUPSI

Durasi	4 Pertemuan
Capaian Pembelajaran	Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa dapat: 1. Memahami Ayat dan hadits tentang korupsi 2. Memahami bentuk hukum korupsi menurut Islam 3. Menggunakan teori atau konsep yang sesuai dengan konteksnya.

Sebagai calon guru professional yang beragama, khususnya muslim atau sebagai seorang yang beragama secara khusus anda tentu memiliki sedikit gambaran tentang larangan agama terhadap perilaku korupsi bagi setiap insan manusia (guru, warga sekolah, dan siswa). Atau mungkin berdasar pada pengalaman anda yang mendapati Tindakan **korup** yang notabnya dilakukan oleh mereka yang mengetahui Agama. Menurut anda apakah setiap manusia akan melakukan korupsi dalam hidupnya? Apakah mereka mengetahui dengan jelas larangan dan hukuman korupsi yang disebut dalam ayat-ayat suci? Apakah anda pernah korupsi?

Sebagai seorang guru, Anda juga tentu perlu menjunjung nilai-nilai kebaikan yang tidak hanya berdasar pada konsep moral secara umum tetapi juga berdasar pada nilai-nilai Agama. Sebab tugas seorang guru adalah selain sebagai orang yang mentransformasikan pengetahuan ia juga adalah seseorang yang mentransformasikan nilai-nilai kehidupan yang berasal dari nilai agama dan sosial dalam rangka menyiapkan anak didik yang bertanggungjawab dan menjunjung nilai-nilai positif.

A. Mulai dari Diri

Sebelum berdiskusi lebih lanjut mengenai topik ini, mari simak dan respon pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Setiap muslim dan orang yang beragama tentu pernah membaca kitab sucinya atau mendengar kajian-kajian keagamaan yang ada hubungannya dengan korupsi.

Ceritakan tanggapan anda tentang ayat yang ada dalam kitab suci yang menyebutkan larangan melakukan Tindakan korupsi dan hal apa dalam ayat tersebut yang menarik anda.



2. Ketika seseorang **melakukan Tindakan korupsi** terkadang tidak selalu yang bersangkutan adalah seseorang yang sedang berada dalam kesulitan, banyak diantara mereka justru yang sudah berkecukupan dan tak berkekurangan ditambah mereka adalah orang yang mengetahui agama dengan baik (muslim atau selainnya). Menurut Anda, apa alasan sebenarnya mereka melakukan hal demikian? Jika itu merugikan apa hukuman dalam perspektif Islam (agama) yang tepat diletakan pada mereka?

3. Mengapa agama (islam secara lebih khusus) harus masuk pada aspek kehidupan manusia yang komplek? Bagaimana pandangan anda jika ada bagian dari hukum agama menjadi hukum alternatif bagi sebuah negara?



B. Eplorasi Konsep

Frederick C. Mish mengatakan bahwa asal kata korupsi berasal dari kata “*Corruption*” atau “*to Corrupt*”. Hal senada dikemukakan oleh Fockema Andreae, korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* atau dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari Bahasa latin inilah turun ke beberapa Bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, corrupt*. Prancis; *Corruption*, Bahasa Belanda; *Corruptive* lalu ke Bahasa Indonesia *korupsi*.

Secara etimologi korupsi bermakna orang-orang yang memiliki kekuasaan dan berkeinginan melakukan kecurangan atau Tindakan lainnya demi memperoleh jabatan, uang dan keuntungan pribadi dan golongannya. Secara etimologi korupsi juga bermakna kejahatan, kerusakan, kebusukan, keburukan, kecurangan, ketidakjujuran, menyuap, penipuan, tidak bermoral, penyimpangan dari kata kesucian, kata-kata ucapan yang menghina atau memfitnah.

Secara terminologis korupsi diistilahkan oleh Bank Pembangunan Asia Tenggara dan Lembaga transparansi international sebagai perilaku mereka-mereka yang bekerja disektor public dan swasta baik politisi mauapaun pegawai negeri, yang secara tak wajar dan tak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang berdekatan dengannya atau merangsang orang lain berbuat serupa dengan menyalahgunakan kedudukan yang mereka emban.

Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan public untuk keuntungan pribadi dan golongan. Tidak jauh berbeda dengan Klitgaard, Unesco Courier (1996) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan. Begitu juga dengan Kominsi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan memperkaya diri sendiri.

Sebelum menjelaskan hal ini secara lebih jauh dalam perspektif Agama, seorang guru harus memahami konsep yang ada tentang teori korupsi dalam Quran dan hadits dan bagaimana hukum Islam melihatnya.

1. Korupsi Dalam Quran

Setelah mencermati ayat-ayat Quran tentang korupsi terdapat beberapa istilah yang dikategorikan pada istilah khusus dan umum dalam korupsi menurut Quran:

a. Term Khusus Korupsi

1) Ghulul (penghianatan),

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلُظَ وَمَنْ يُغْلُظْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ



Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. (Al-Imran 161).

2) Al-Suht (penyuapan)

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يَصْرُوك شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Al-Maidah 42)

3) Harb dan Fasad (Peramokan dan pengrusakan)

لِنَّمَا جَزَأُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جزِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَجْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat. (Al-Maidah 33)

4) Al-Sarq (Pencurian)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ الله وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Al-Maidah 38)

5) Al-Ghasab (Perampasan)

أَمَّا السُّؤْيَةُ فَكَانَتْ لِمَسْلُكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَن أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa. (Al-Kahfi 79)



b. Term Korupsi Secara Umum

1) Al-Khasar (kecurangan)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ وَرَثُهُمْ يُخْسِرُونَ

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Al-Muthafifin, 1 dan 3)

2) Taawun 'alal ismi (kolusi)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَكُمْ شَتَائُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Maidah, 2)

3) Makar (Penipuan/Tipu muslihat)

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku dan mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Mereka pun melakukan tipu daya yang sangat besar. (Nuh, 21-22)

4) Khabais (kelicikan)

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (An-Nisa, 2)

5) Ad-Dhahal (penggelapan)

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَرُلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَدْأُوا السُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kukuh tegaknya dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan bagi kamu azab yang besar. (An-Nahl, 94)

2. Korupsi Dalam Hadits

a. Al-Rasyi (penyuapan)

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْحَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Laits dari Abu Al Khoththob dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar).

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum." (HR. Ibnu Hibban)

b. Nuhbah (perampokan)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُتْلَةِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya beliau melarang nuhbah (harta rampokan) dan perbuatan mutilasi." (HR. Bukhari)

3. Bentuk Penafsiran Al-Quran

Secara etimologis tafsir berasal dari kata *fassara-yufassiru-tafsiiran* yang berarti keterangan atau penjelasan (*Al-Idhah wa tabyin*) sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Furqan 33.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا^{٥٥}



Tidaklah mereka datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, kecuali Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik.

Dua bentuk penafsiran Al-Quran

a. Tafsir bi Al-Matsur

Adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan as-sunah, dan Al-Quran dengan pendapat atau penafsiran para sahabat nabi dan tabiin. Dinamai bi Al-matsur berasal dari kata *atsar* yang berarti sunah, hadits, jejak, dan peninggalan. Karena dalam menafsirkan Al-Quran seseorang menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya sampai kepada nabi Muhammad Saw. Karena banyak menggunakan Riwayat maka tafsir dengan metode ini dinamai juga dengan tafsir bi Ar-Riwayah (Riwayat).

b. Tafsir bi Ar-Rayi

Tafsir bi Ar-Rayi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan kemampuan ijtihad atau pemikiran atau logika tanpa meninggalkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadits dan tidak pula meninggalkan sama sekali penafsiran para sahabat dan tabiin. Bentuk ini mengembangkan penafsiran dengan bantuan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti ilmu Bahasa Arab, ilmu Qiraah, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hadits, ushul fiqh, ilmu Sejarah, dan lain sebagainya, dinamakan tafsir bi Ar-Rayi karena yang dominan memang penalaran atau ijtihad mufasir itu sendiri.

4. Konsep Hukum Pidana Islam (Al-Fiqh Al-Islamiy)

Hukum islam merupakan terjemahan dari dari kata *Al-Fiqh Al-Islamiy*, yang dalam literatur barat disebut dengan istilah *the islamic law* atau dalam batas-batas yang lebih longgar *the Islamic jurisprudence*. Alquran atau as-sunah tidak pernah menurunkan kata *Al-Hukm Al-Islami* (hukum islam) kata ini hanya muncul dalam khazah bahasa Indonesia, sinonim yang ada dalam Al-Quran adalah as-Syariah yang bermakna peraturan atau undang-undang. Para pakar hukum islam mengartikan Al-syariah sebagai perundang-undangan atau hukum, maka setiap undang-undang atau peraturan yang berasal dari Al-Quran dan hadits disebut dengan syariat islam.

Hukum islam merupakan aturan pokok yang memuat norma perintah dan larangan Allah dan rasul. Para fukaha (ahli fikih menyebutnya dengan himpunan hukum amaliyah, seperti ibadah, muamalah, jinayah, persengketaan, perjanjian, dan transaksi. Ayat hukum yang berhubungan dengan ibadah terdapat 140 ayat. Untuk akhwal syahsiyah dan perkawinan, perceraian, perwarisan, wasiat, berjumlah 70 ayat. Untuk keperdataan berupa jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, perserikatan, perdagangan, utang piutang berjumlah 70 ayat. Kepidanaan berjumlah 30 ayat.



Peradilan dan persaksian sebanyak 20 ayat. Hadist yang berbicara hukum sekitar 4500 hadits dan kebanyakan dari hadits-hadits tersebut merupakan interpretasi bagi hukum Al-Quran yang masih bersifat global.

Dari keterangan diatas diketahuilah bahwa hukum pidana Islamlah yang secara khusus membahas tindak pidana kejahatan termasuk didalamnya tindakan pidana korupsi. Hukum pidana Islam dalam istilah fiqh disebut *jinayah*. Secara etimologi kata *jinayah* terambil dari kata *jana* yang berarti berbuat salah atau dosa, dalam pengertian ahli hukum islam *jinayah* diartikan dengan perbuatan yang terlarang menurut syara karena dapat mengancam keselamatan jiwa, harta, keturunan, dan akal manusia.

5. Hukuman Korupsi Dalam Al-Quran

a. Korupsi dalam batas hudud

Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi jenis ini akan dihukum sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunah. Bentuk wilayah dalam batas wilayah jarimah hudud terdiri dari dua bentuk, yaitu; jarimah Al-syariqah (pencurian) dan jarimah Al-Hirabah (perampokan). Seperti diuraikan bahwa berdasarkan alasan-alasan logis kedua jarimah tersebut dapat diamini sebagai salah satu tipologi korupsi. Dengan demikian jenis hukuman kedua jarimah ini pun tentu dapat disepadankan dengan hukuman korupsi. Diantara bentuk korupsi dalam batas hudud adalah:

1) Korupsi pencurian (Al-Sariqah)

Bentuk hukuman jarimah korupsi pencurian dapat ditetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah: 38 yakni dengan penerapan hukum potong tangan dan penyitaan harta curian. Apabila telah terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subjek, objek, maupun materi curian. Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya. Pembantu mencuri harta tuannya, dan pencurian di musim paceklik. Misalnya kasus di masa Umar bin Khatab yang membebaskan hukum potong tangan bagi seorang miskin yang mencuri dan ketika itu sedang terjadi musim paceklik. Tindakan Umar ini menjadi sumber inspirasi kepada para penafsir kontemporer seperti Rahman dan Syahrur. Bagi Rahman misalnya ketentuan legal spesifik tidak harus selalu dilakukan. Karena yang terpenting adalah dimensi ideal moral dibalik ketentuan legal formal, yaitu perlunya menciptakan keadilan sosial. Sehingga kalau logika ini disepakati maka suatu pemerintahan belum dapat menciptakan iklim yang berkeadilan sosial, di situ ada syubhat yang dapat menggugurkan hukuman potong tangan dan dengan meninggalkan hukum potong tangan ini tidak berarti menjadi tidak Islami. Jadi berdasar pada pandangan ini jika ada pejabat yang terbukti korupsi, maka ia



harus 'dipotong tangannya' dalam arti dipecat jabatannya dan uang yang dikorupsi harus disita dan diproses secara hukum sesuai kadar kesalahannya.

2) Korupsi Perampokan

Bentuk hukuman bagi pelaku hirabah berbeda-beda berdasarkan cara pandang terhadap surah Al-Maidah: 33. Muhammad Syahrur dalam memahami ayat dia atas memaparkan bahwa secara global ada tiga bentuk pilihan hukuman yang dapat diterapkan bagi muharib (perampok), yaitu hukuman mati, potong tangan, atau penjara seumur hidup. Ketiga bentuk hukuman ini merupakan batas maksimal. Artinya penguasa tidak dapat menetapkan dan memutuskan di luar wilayah tiga hukuman tersebut. Penguasa hanya boleh berijtihad dalam salah satu tiga hukuman tersebut, yakni hukuman mati, potong tangan atau penjara seumur hidup sesuai kadar perbuatan masing-masing pelaku. Kemudian semua hukuman dapat digugurkan jika pelaku bertobat dan memohon maaf kepada korban sebelum sampai kehadiran sidang pengadilan.

b. Korupsi Dalam Batas Ta'zir

Setiap kejahatan yang telah ditentukan sanksinya oleh Al-Quran maupun sunah disebut dengan *jarimah hudud*, sedangkan jarimah yang tidak disebut sanksinya oleh nash disebut *jarimah ta'zir* jenis hukuman ini dapat ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan umum. Beberapa hukuman jenis ini jika berdasar pada hukum islam adalah hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman buang, peringatan keras, dihadirkan didepan siding, dicela, dikucilkan, dihasehati, dipecat dari jababannya, dicabut hak-ahak tertentu. Beberapa bentuk hukuman ini dalam Al-Quran adalah:

1) Korupsi uang suap (Al-Suhtu)

Meskipun suap termasuk dosa namun bentuk hukumannya dalam Al-Quran baru berupa sangsi ancaman akherat sebagaimana halnya korupsi ghulul (pengkhianatan). Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Maidah: 62 dimana Allah menegur keras rahib-rahib Yahudi yang melakukan praktik suap menyuap, namunpun demikian teguran keras ini ditujukan kepada seluruh manusia. Pada masa sekarang sebab suap telah masuk dalam kategori korupsi maka bentuk hukumannya telah diformat berdasarkan kemaslahatan umum.

2) Korupsi kerakusan

Delik korupsi bentuk ini adalah delik pemaksaan untuk memberikan barang, membayar uang dan memberi tenaga. Secara garis besar unsur-unsur kejahatan dalam delik ini adalah penyalahgunaan wewenang, permintaan memaksa, dan pemerasan. Berpijak pada unsur-unsur tersebut maka



perbuatan yang masuk dalam ketogori ini seperti perampasan harta (gasab) dan pengkhianatan (ghulul).

Yang termasuk pada bentuk yang kedua ini adalah Perkara lain dalam jenis korupsi yang hukumannya tidak ditegaskan adalah korupsi perampasan dan atau pemerasan (gasab), Al-Quran tidak menyebutkan bentuk hukuman badani kepada pelaku perampasan harta kecuali hanya sebuah pesan sangsi moral, jika perbuatan diatas adalah perbuatan buruk yang dapat merugikan masyarakat sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Al-Kahfi: 79.

Atau bentuk lain dari korupsi model ini adalah korupsi kecurangan (*khasar, taffafa, bakhsa, dan naqasa*). Yang dalam isilah saat ini serupa dengan mengurangi takaran timbangan, pemalsuan dokumen, pemalsuan catatan pembukuan perbendaharaan, persekongkolan semacam kontrak order pengadaan barang, penawaran dalam kontrak, wewenang memberikan sebuah kontrak, wewenang setelah kontrak, penipuan.

Semua Tindakan ini ditemukan sangsi hukuman badainya dalam Quran. Hukuman atas Tindakan jenis korupsi diatas hanya hukuman di neraka, sekenario kecurangan itu akan di tulis di *sijjin* sebuah nama kitab khusus mencatat segala macam kegiatan orang-orang yang berbuat curang. Perbuatan orang curang sejatinya perbuatan yang dapat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat maka hukuman yang pantas diberikan di dunia adalah hukuman taz'ir berupa teguran keras, dikucilkan, atau diberitakan padanya akan dimasukan ke dalam neraka.

Seorang calon kepala daerah kedapatan membagi-bagi uang diwilayah pemilihannya dan dituduh telah melakukan Tindakan money politic, sewaktu di introgasi ia mengatakan bahwa yang dilakukannya bukanlah money politic tetapi berbagi dan bersedekah

Setujukah anda dengan pandangan tersebut? Mengapa? Jika tidak mengapa? Apakah tindakannya termasuk pada bentuk korupsi yang digambarkan dalam hukum Islam (Al-Quran dan Hadits), Ayat Quran dan hadits manakah yang sesuai dengan itu? Menurut hukum islam hukuman apakah yang sesuai untuknya?

c. Korupsi Dalam Batas Mukhalafah

Hukuman korupsi dalam batas *jarimah mukhalafah* adalah hukuman yang diberikan kepada pegawai negeri atau seseroang yang melakukan kekeruang disiplin atau pelanggaran terhadap peraturan pemerintah. Seperti bagi seorang pegawai negeri misalkan, pegawai negeri sebagaimana dipahami harus memenuhi sekian kewajiban kepegawaiannya. Jika kewajiban-kewajiban ini dilanggar oleh



seorang pegawai negeri maka ia telah dianggap melakukan korupsi dalam batas *jarimah mukhalafah*. Pelaku dapat dikenakan sanksi yang tidak bisa diancam dengan hukuman penjara, tetapi hanya dapat dihukum dengan membayar denda, peringatan keras atau dipecat dari kepegawaiannya.

C. RUANG KOLABORASI

Setelah mempelajari konsep Al-Quran, Hadits, dan Fiqih dalam menggambarkan korupsi. silakan bekerja dalam kelompok (3-4 orang) untuk memberikan pendapat atau solusi pada kasus- kasus berikut (waktu 45 menit).

Memberikan Tanggapan terhadap perilaku korupsi

Bacalah kasus-kasus berikut ini. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan berdiskusi bersama kelompok. Gunakan bekal pengetahuan anda mengenai konsep yang telah dipelajari untuk memberikan jawaban yang informatif dan solutif.

Kasus 1

Jika ada seorang kepala sekolah berencana melakukan penggelapan keuangan sekolah atau memanipulasi data keuangan untuk ia gunakan sendiri atau ia bagi-bagikan pada semua guru dan karyawan. Lalu di satu waktu anda mengetahui dengan jelas apa yang hendak dia lakukan dan ia menjanjikan untuk memberikan bagian kepada anda lebih besar jika anda mau membantu tetapi jika anda menolak maka anda akan dikeluarkan atau dicari kesalahannya

1. Apa pendapat anda terhadap kepala sekolah tersebut? Dan bagaimana tanggapan anda? Menolak, menentang atau menerima? Mengapa?
2. Dari konsep ayat dan hukum Fiqih di atas, Tindakan kepala sekolah tersebut masuk dalam kategori yang mana?

Kasus 2

Pada saat proses akreditasi yang dilakukan pihak sekolah kerap kali didapati data satu kegiatan dan lainnya kurang atau tidak dijalankan, jika hal ini tidak dipenuhi maka akan menjadi temuan serius atau nilai akreditasi sekolah bisa menurun sesuatu yang kebanyakan sekolah tidak menginginkannya, lantas untuk menghindari keadaan tersebut banyak guru bersepakat agar data yang tidak ada diada-adakan, kegiatan yang tidak terlaksana agar ditulis telaksan dengan baik.

Menurut anda bagaimana cara anda memahamkan segenap guru bahwa apa yang dilakukan adalah Tindakan korupsi atau salah? Dalam tinjauan hukum fiqh, apakah yang dilakukan di atas masuk pada hukum dan kategori korupsi yang ditegaskan di dalam *nash*? Sebutkan alasannya



Kasus 3

Mantan komisioner KPK Abdulah Hehamahua pernah menyampaikan dalam salah satu acara TV bahwa mereka yang melakukan korupsi sebaiknya di potong saja satu ruas jarinya, jika kembali melakukan dipotong lagi ruas jarinya yang lain dan begitu seterusnya, hal ini ia kemukakan sebab mungkin ia memaknai surat Al-Maidah 38 sebagaimana apa adanya yakni potong tangan, walau dalam ijtihadnya ia menawarkan yang 'lebih lembut' yaitu dengan memotong ruas jari sebagai efek hukuman yang lebih berat

1. Setujukah anda dengan pendapat tersebut? Mengapa?
2. Dari segi hukum islam apa sebaiknya hukuman yang tepat menurut anda bagi pelaku korupsi? Apakah itu cukup efektif untuk mengikis korupsi? Jelaskan

D. Demontrasi Kontekstual

Setelah menyelesaikan tugas secara berkelompok, saat ini Anda akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok Anda melalui metode galeri belajar (*gallery walk*) atau forum diskusi. Perhatikan petunjuk berikut untuk memandu Anda bekerja.

1. Buatlah materi presentasi yang menarik dalam bentuk audio dan visual (video singkat, poster, salindia, peta pemikiran, penjelasan bergambar, kultum, atau yang lain) dalam waktu 15 menit.
2. Masing-masing kelompok wajib memberikan satu pertanyaan, pernyataan, saran, kritik, sanggahan, atau lainnya, kepada kelompok lain.
3. Ketua kelompok membagi tugas kepada seluruh anggota kelompok (termasuk dirinya sendiri) secara merata, untuk memberikan tanggapan di forum diskusi.
4. Seluruh mahasiswa menyimak tanggapan kelompok dan mengomunikasikan kembali secara kontinyu terhadap pernyataan, saran, kritik, pertanyaan, atau sanggahan dari kelompok lainnya.
5. Setiap mahasiswa melakukan refleksi mengenai kegiatan hari ini.

E. ELABORASI PEMAHAMAN

Setelah mengkaji secara mendalam dan mengaplikasikan pemahaman beragam konsep korupsi dalam Quran, hadist dan Hukum Islam Anda diminta untuk mengamati secara langsung penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks kehidupan yang lebih luas secara individu.

Melakukan pengamatan langsung terhadap ayat Al-Quran atau hadits berkenaan dengan Korupsi

1. Anda diminta untuk mengamati secara



2. mendalam beberapa ayat dan hadits tentang korupsi dan konsep hukum yang berkenaan dengannya.
3. Pilihlah satu atau dua ayat yang akan di amati atau hadits yang berhubungan dengan korupsi yang berkorelasi dengan Tindakan korupsi di masa kini.
4. Jelaskan penafsiran dari ayat tersebut (Termasuk dalam tafsir bentuk apakah penjelasannya), sebab turun ayat, dan konsep hukum terhadapnya. Jika itu hadits lengkapi rangkain redaksinya dan sebab turunnya, dan pesan penting apa yang hendak disampaikan dalam hadits tersebut. Lengkapi keduanya dengan memberikan kesimpulan dari anda.
5. Lengkapi dengan rujukan kitab tafsirnya (yang berbahasa Indonesai: Tafsir Mahmud Yunus (Tafsir Quranul Karim), Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi (an-Nur), Tafsir Hamka (Al-Azhar), Tafsir M. Qurais Shihab (Al-Misbah), Tafsir Tanwir Muhammadiyah
6. Tuliskan refleksi anda pada kolom bagian refleksi sesuai dengan petunjuk.

F. KONEKSI ANTAR MATERI

Setelah melakukan pengamatan terhadap ayat, hadits dan tinjauan hukum tentang korupsi. Anda diminta untuk menemukan hubungan antara gambaran Quran dan hadits tentang korupsi dengan perilaku korupsi yang ada di masyarakat saat ini, dan secara khusus dengan penerapan hukuman pada para koruptor di negara ini. Gunakanlah pertanyaan-pertanyaan panduan berikut untuk membantu berpikir.

1. Setujukah anda jika korupsi itu di samakan dengan mencuri? Elaborasi jawaban anda?
2. Menurut anda apa saja hal perlu dipertimbangkan oleh suatu negara jika ia hendak memasukan salah satu hukuman yang ada dalam kitab suci agama tertentu ke dalam peraturan perundang-undangannya?
3. Usaha apa yang akan anda lakukan untuk mengikis perilaku korupsi dimulai dari lingkungan anda bekerja?

G. AKSI NYATA

Setelah memahami beragam konsep dan melakukan pengamatan langsung tentang penerapan konsep-konsep tersebut, silakan menuliskan refleksi berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Gunakanlah pertanyaan- pertanyaan berikut sebagai panduan.

1. Menurut anda apakah hukuman pada koruptor di Indonesia sudah sesuai dengan konsep hukum dalam Islam? Elaborasi jawaban anda dengan menceritakan hasil pengamatan yang telah dilakukan.



2. Menurut anda apakah segala macam tindakan korupsi yang anda ketahui telah sesuai dengan gambaran Al-Quran? Elaborasi jawaban Anda dengan menceritakan hasil pengamatan yang telah dilakukan.
3. Menurut anda apakah Islam telah mengatur dengan baik bagaimana caranya seseorang tidak melakukan tindakan korupsi? Elaborasi jawaban Anda dengan menceritakan hasil pengamatan yang telah dilakukan.

UAS: Esai Analisis dan Refleksi tentang Asesmen Pembelajaran

1. Bacalah berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia!
2. Buatlah Opini yang merupakan gagasan ataupun pandangan terhadap kasus korupsi berdasarkan perspektif Islam (mengacu Alquran atau hadist)!



PENUTUP

Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik merupakan dasar dari pendidikan. Modul Literasi Antikorupsi Berbasis Profil Pelajar Pancasila Dalam Prespektif Islam diharapkan dapat membekali mahasiswa tentang memahami konsep-konsep antikorupsi dalam perspektif Islam serta bagaimana mengintegrasikan hal tersebut dalam profil pelajar Pancasila dan menggunakan literasi sebagai sarana menyampaikan wacana antikorupsi.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam modul ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan modul ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 2012. *Linguistik Umum*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Nusa Indah.
- Kridalaksana, Harimurti. 2013. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kushartanti dkk. 2003. *Pesona Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Noermanzah. 2017. "Rhetorical Devices in the Presidential Speeches of the President of the Republic of Indonesia in the Reformation Era". ISLLE.
- Rahman, Taufiqur. 2017. *Teks Dalam Kajian Struktur Dan Kebahasaan*, ed. by Hamidulloh Ibda. Semarang: Pilar Nusantara.
- Ramadhanti, D., & Yanda, D. P. (2022). *Pembelajaran Menulis Teks: Suatu Pendekatan Kognitif*. Deepublish.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Tugas UTS dan UAS

Tugas UTS: Rancangan Proyek Sosialisasi dan Penyuluhan Anti Korupsi

Susunlah rancangan proyek sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi di sekolah. Setelah disusun, Praktikan sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi tersebut dalam laporan kegiatan. Adapun laporan kegiatan berupa materi, daftar hadir dan video kegiatan berdurasi maksimal 10 menit.

Tugas UAS: Esai Analisis dan Refleksi tentang Asesmen Pembelajaran

3. Bacalah berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia!
4. Buatlah Opini yang merupakan gagasan ataupun pandangan terhadap kasus korupsi berdasarkan perspektif Islam (mengacu Alquran atau hadist)!

Kentuan Opini:

Pembuka (2-3 paragraf)

1. Penulis dapat menjelaskan isu yang sedang terjadi.
2. Penulis dapat mengutip cuplikan berita pada koran sebelumnya, terkait isu yang akan di bahas

Isi (2-3 paragraf) Jelaskan dampak yang ditimbulkan

Penutup (2-3 paragraf)

Berikan solusi terkait isu tersebut.



Rubrik Penilaian

Rubrik 1. Rubrik Penilaian Studi Kasus dan Presentasi

Skor	Kriteria
5 (sangat baik)	Mahasiswa mampu menyebutkan seluruh kata kunci dan dapat menjelaskan dan atau mengaitkannya dengan tepat.
4 (baik)	Mahasiswa mampu menyebutkan sebagian besar kata kunci, dan dapat menjelaskannya dan atau mengaitkannya dengan tepat
3 (cukup)	Mahasiswa mampu menyebutkan sebagian kecil kata kunci, dan dapat menjelaskannya dan atau mengaitkannya dengan tepat
2 (kurang)	Mahasiswa mampu seluruh atau sebagian kata kunci, dan menjelaskannya namun dengan tidak tepat
1 (buruk)	Mahasiswa hanya mampu menyebutkan kata kunci, namun tidak menjelaskan atau mengaitkannya
0 (sangat buruk)	Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali



Rubrik 2. Rubrik Video, Poster, dan Artikel

No	Aspek	Skor dan Kriteria		
		3	2	1
1.	Sistematika laporan, video, artikel, atau poster lengkap	Laporan, video, artikel, atau poster lengkap dan terorganisasi dengan baik	Laporan, video, artikel, atau poster lengkap namun tidak terorganisasi dengan baik	Laporan, video, artikel, atau poster lengkap tidak lengkap dan tidak terorganisasi dengan baik
2.	Tata tulisan artikel (penggunaan huruf kapital, huruf miring, tanda baca) dan penjelasan dalam video runtut/poster menggambarkan dengan jelas	Tata tulis/video benar dan menggunakan Bahasa yang benar dan baku	Salah satunya, tata tulis/video tidak benar atau bahasa tidak benar dan tidak baku	Tata tulis/video tidak benar, dan Bahasa tidak benar dan tidak baku
3.	Pendahuluan	Uraian latar belakang sesuai dengan topik praktik	Uraian latar belakang kurang sesuai dengan topik praktik	Uraian latar belakang tidak sesuai dengan topik praktik
4.	Hasil dan Pembahasan	Hasil analisis dan pembahasan tepat sesuai konteks	Hasil analisis tepat, namun pembahasan kurang tepat	Hasil analisis data dan pembahasan tidak tepat
5.	Kesimpulan	Tepat menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan praktik dan perolehan data	Kurang tepat menarik kesimpulan, salah satunya, karena tidak sesuai tujuan praktik atau perolehan data	Kesimpulan tidak sesuai dengan tujuan praktik dan perolehan data
6.	Referensi	Referensi yang digunakan berusia 3 tahun terakhir	Referensi yang digunakan berusia 5 tahun terakhir	Referensi yang digunakan berusia lebih dari 5 tahun
7.	Ketepatan Waktu	Tugas dikumpulkan tepat waktu atau sebelum batas waktu.	Tugas dikumpulkan lewat 1 hari setelah batas waktu.	Tugas dikumpulkan setelah lewat 2 atau lebih